



2024

# LAPORAN KINERJA

Untuk periode yang berakhir **31 Desember 2024**



KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MAMUJU  
(KPP 814)

0811 4252 500  
kpp.814@pajak.go.id  
Jalan Urip Sumoharjo No. 46  
Karema, Mamuju, 91511



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Tahun 2024, LAKIN merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selama tahun 2024.

Maka dari itu, untuk memenuhi kewajiban serta menjawab segala harapan dan tantangan di masa yang akan datang, dengan ini kami sampaikan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Tahun 2024.

Mamuju, 21 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Mamuju



Ditandatangani secara elektronik  
La Ode Irfah Firdaus



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
Bab I Pendahuluan .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Profil, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	3
C. Sistematika Laporan.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja .....	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran .....	114
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	116
D. Kinerja Lain-Lain.....	117
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	117
Bab IV Penutup.....	121
LAMPIRAN.....	122



## Bab I Pendahuluan

### A. Latar Belakang

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, dan ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju.
2. Permasalahan utama yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi antara lain yaitu tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang tergolong rendah, kondisi sarana dan prasarana di beberapa bagian wilayah kerja yang kurang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara self assessment seperti jaringan internet yang kurang memadai, serta kurangnya jumlah SDM (tidak memenuhi jumlah sesuai hasil Analisis Beban Kerja)

### B. Profil, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

#### 1. Profil, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berikut ini merupakan Profil, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju:

##### 1.1. Profil KPP Pratama Mamuju

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju merupakan satuan kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Mamuju berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Pratama Mamuju merupakan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan "good governance" dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat dibentuk pada tahun 2008, wilayah kerja KPP Pratama Mamuju meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Pada tahun 2012, terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Mamuju sehingga terbentuk Kabupaten Mamuju Tengah. Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu di tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Mamuju ditunjang oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya yang berada di Kabupaten Pasangkayu. Dengan demikian, wilayah kerja KPP Pratama Mamuju meliputi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Adapun beberapa gambar tampak depan KPP Pratama Mamuju dari tahun 2008 sampai dengan sekarang disajikan dalam Gambar I.B.1.1.a – I.B.1.1.d berikut.



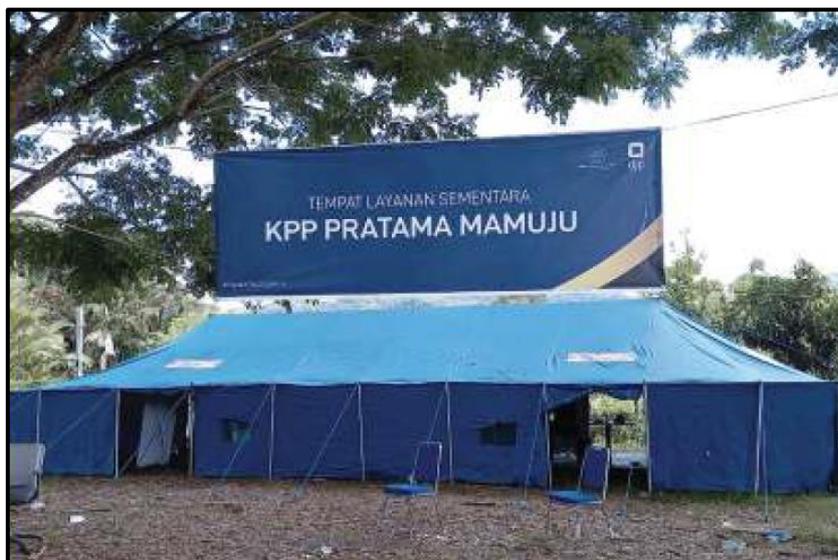
Gambar I.B.1.1.a Tampak Depan KPP Pratama Mamuju, Jalan Abdul Syakur, Tahun 2008 – 2013

Ruko yang berkedudukan di Jalan Abdul Syakur, Karema, Kec. Mamuju ini merupakan lokasi pertama saat KPP Pratama Mamuju didirikan pada tahun 2008.



Gambar I.B.1.1.b Tampak Depan KPP Pratama Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Tahun 2013 – 2021

Gedung yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Karema, Kec. Mamuju ini merupakan lokasi kedua KPP Pratama Mamuju setelah pindah dari lokasi sebelumnya. Gedung ini merupakan aset Kementerian Keuangan yang pada saat itu dikelola oleh Sekretariat Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju. Tidak hanya KPP Pratama Mamuju, terdapat pula beberapa satuan unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang menempati gedung tersebut, yaitu Sekretariat GKN Mamuju, Kanwil DJPb Sulawesi Barat, KPPN Mamuju dan KPKNL Mamuju.



Gambar I.B.1.1.c Tampak Depan KPP Pratama Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Januari – Februari 2021

Pada tanggal 16 Januari 2021, telah terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6.2 di wilayah Mamuju yang mengakibatkan Gedung Keuangan Negara Mamuju rusak berat. Sehingga selama 1 bulan, KPP Pratama Mamuju mendirikan Tempat Layanan Sementara berupa tenda darurat di area parkir GKN Mamuju agar dapat tetap memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.



Gambar I.B.1.1.d Tampak Depan KPP Pratama Mamuju. Jalan Urip Sumoharjo No.46, Februari 2021 – Sekarang

Sejak bulan Februari 2021 kegiatan operasional KPP Pratama Mamuju mulai berpindah ke ruko yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Mamuju, sampai dengan saat ini. Berlokasi di daerah rawan gempa, kondisi ini menyebabkan KPP Pratama Mamuju menghadapi kesulitan untuk memiliki kantor yang representatif sebagai kantor pelayanan, baik terkait penyediaan pelayanan bagi masyarakat maupun penyediaan tempat bekerja yang nyaman bagi para pegawainya. Namun, KPP Pratama Mamuju tetap memberikan pelayanan yang optimal serta senantiasa memberikan kenyamanan yang maksimal bagi masyarakat.

## 1.2. Tugas KPP Pratama Mamuju

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja dari KPP Pratama Mamuju sangat luas meliputi 3 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Masing-masing Kabupaten memiliki luas sebagaimana Tabel I.B.1.2.a dan I.B.1.2.b berikut.

Uraian	Luas Wilayah Kerja
Kabupaten Mamuju	4.979,89
Kabupaten Mamuju Tengah	3.100,87
Kabupaten Pasangkayu	3.043,75
<b>Jumlah Luas Wilayah Kerja</b>	<b>11.124,51</b>
<b>Luas Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>16.787,18</b>
<b>Luas Kawasan Ibu Kota Nusantara</b>	<b>561,80</b>

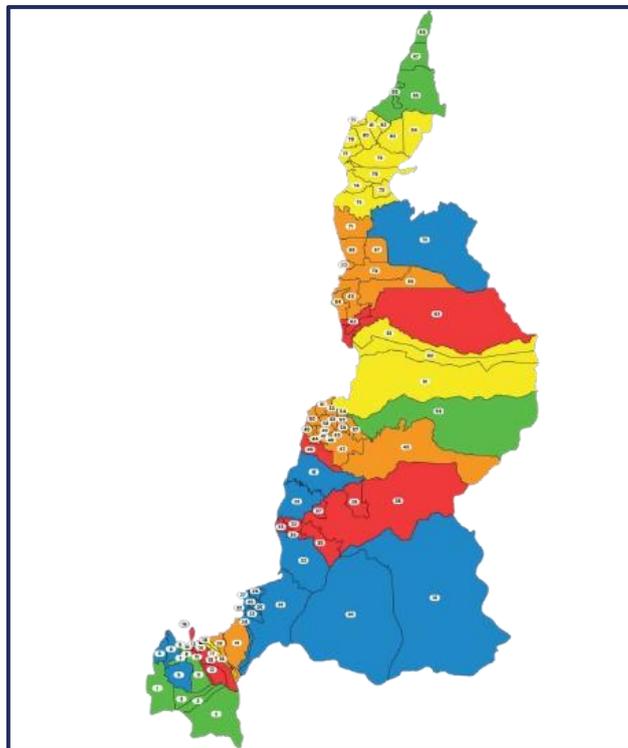
Tabel I.B.1.2.a Luas Wilayah Kerja KPP Pratama Mamuju (dalam km<sup>2</sup>)



Gambar I.B.1.2.b Wilayah Kerja KPP Pratama Mamuju

Wilayah kerja KPP Pratama Mamuju dibagi menjadi 5 zona pengawasan dimana masing-masing seksi pengawasan memiliki zona di tiap kabupaten. Sebagian besar penggunaan lahan di wilayah kerja KPP Pratama Mamuju didominasi oleh perkebunan. Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di Kabupaten Pasangkayu. Lahan perkebunan juga terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh perkantoran dan juga lahan komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, pusat oleh-oleh, kuliner, serta mall.

Rincian pembagian zona pengawasan di wilayah kerja KPP Pratama Mamuju sebagaimana Gambar I.B.1.2.c berikut.



Gambar I.B.1.2.c Pembagian Wilayah Kerja Tahun 2024

### 1.3. Fungsi KPP Pratama Mamuju

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Mamuju memiliki fungsi:

- analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak;
- pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;



- pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- pemutakhiran basis data perpajakan;
- pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- pelaksanaan administrasi kantor.

## 2. Struktur Organisasi

### 2.1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Mamuju memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### 1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

#### 2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.



### 3. Seksi Pelayanan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

### 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

### 5. Seksi Pengawasan I

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak Strategis mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Strategis, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak Strategis, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

### 6. Seksi Pengawasan II sampai dengan VI

masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak berdasarkan kewilayahan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan kewilayahan, imbauan dan konseling kepada wajib pajak berdasarkan kewilayahan, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

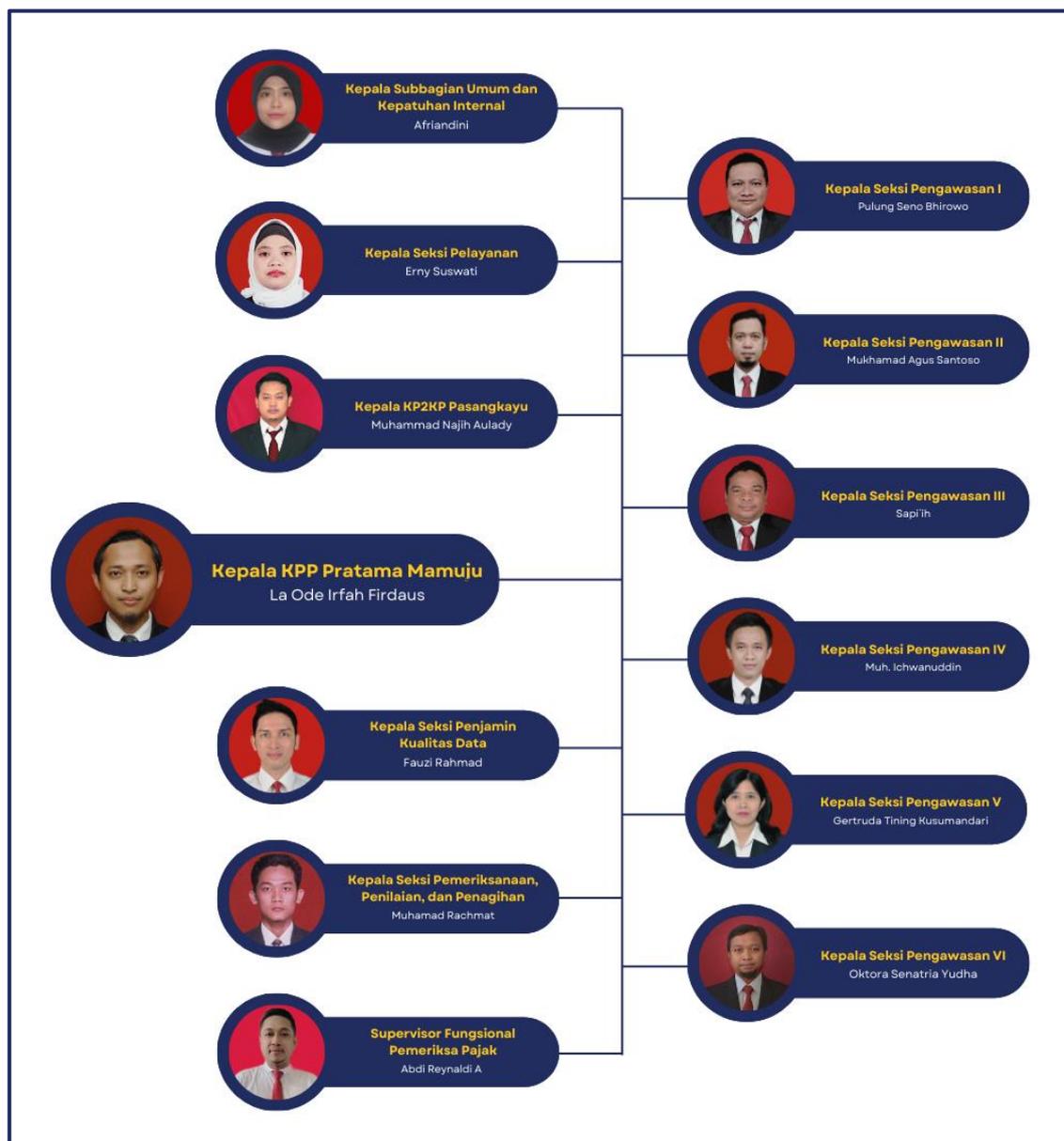
### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi KPP Pratama Mamuju:



Bagan V.A.2.i. Struktur Organisasi KPP Pratama Mamuju Tahun 2024



### 3. Sumber Daya Manusia pada KPP Pratama Mamuju

Penyajian Data Sumber Daya Manusia per 6 Januari 2025 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Pegawai DJP terakhir pada KPP Pratama Mamuju memperhatikan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sebagaimana Tabel I.B.3. berikut:

Kategori	Pria	Wanita	Penyandang Disabilitas	Jumlah Total
<b>Tingkat Pendidikan</b>	39	21	0	60
SMA	1	0	0	1
D1	5	1	0	6
D3	11	11	0	22
D4/S1	15	6	0	21
S2	7	3	0	10
<b>Jabatan</b>	39	21	0	60
Eselon	9	3	0	12
Fungsional	6	2	0	8
<i>Account Representative</i>	10	7	0	17
Pelaksana	14	9	0	23
<b>Usia</b>	39	21	0	60
< 25 tahun	4	6	0	10
25-34 tahun	18	9	0	27
35-44 tahun	11	3	0	14
45-54 tahun	6	3	0	9
≥ 55 tahun	0	0	0	0
<b>Lama Bekerja</b>	39	21	0	60
< 2 tahun	4	5	0	9
2-5 tahun	1	2	0	3
6-10 tahun	16	6	0	22
> 10 tahun	18	8	0	26

Tabel I.B.3. Data SDM KPP Pratama Mamuju pendekatan GEDSI

## C. Sistematika Laporan

### Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

1. Menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dengan memperhatikan informasi tematik APBN.
2. Penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024 yang telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.



### Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
3. Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
4. Menguraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
5. Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

### Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Bab II Perencanaan Kinerja

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan amanat yang harus dipahami dan dilaksanakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berisi Visi, Misi, Nilai-nilai, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

#### 1. Visi DJP

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan



tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

## 2. Misi DJP

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi DJP adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

## 3. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal



Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu:

Nilai-Nilai*	Makna	Kaidah Perilaku Utama
<b>Integritas</b>	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
<b>Profesionalisme</b>	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; Bekerja dengan hati.
<b>Sinergi</b>	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
<b>Pelayanan</b>	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
<b>Kesempurnaan</b>	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melakukan perbaikan terus-menerus;

\*Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

#### 4. Tujuan DJP

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;



- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan **tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024** yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

## 5. Sasaran Strategis DJP

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan **5 (lima) sasaran strategis** yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. **Organisasi dan SDM yang optimal**.
  - b. **Sistem informasi yang andal dan terintegrasi**.
  - c. **Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah**.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditentukan sebagaimana yang disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-31/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang disusun telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024. Pada tahun berjalan, terdapat perubahan pada beberapa Manual Indikator Kinerja sehingga dilakukan addendum.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaat data selain tahunan berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Indikator Kinerja Kepala KPP Pratama Mamuju memiliki **4 (empat) perspektif**, yaitu perspektif dari **Stakeholder**, **Customer**, **Internal Process**, dan **Learning and Growth**. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Mamuju.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

##### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	12,41%	31,34%	31,34%	53,32%	53,32%	100,04%	100,04%
Capaian	82,73%	78,35%	78,35%	75,10%	75,10%	100,04%	100,04%

Sumber: Aplikasi Mandor

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

##### b. Definisi IKU :

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.



Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya

c. Formula IKU :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 100,04%) dengan total penerimaan sebesar Rp686.661.657.584 dari target Rp686.381.611.000.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	101,43%	116,56%	125,24%	102,67%	100,04%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun fluktuasi capaian penerimaan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas khususnya sawit. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja penerimaan adalah:

- i) Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
- ii) Meningkatkan edukasi dan pengawasan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak potensial;
- iii) Pengawasan kewajiban Instansi Pemerintah dengan memperhatikan pagu dan realisasinya;
- iv) *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara); dan
- v) Pengawasan kewajiban pembayaran masa (PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2) PP 55 2023, PPh Pasal 25, PPN) yang dilakukan wajib pajak.



3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	100,04%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami kendala dengan adanya penurunan harga komoditas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju bersinergi kuat dengan gencar melakukan pengawasan melekat terhadap sektor dominan dan potensial, serta gencar melakukan ekstensifikasi potensi perpajakan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,04%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional (APBN) yang ditetapkan.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
  - Meningkatkan edukasi dan pengawasan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak potensial;



- Pengawasan kewajiban Instansi Pemerintah dengan memperhatikan pagu dan realisasinya;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara); dan
  - Pengawasan kewajiban pembayaran masa (PPH Pasal 21, PPh Pasal 4(2) PP 55 2023, PPh Pasal 25, PPN) yang dilakukan wajib pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas dan manajemen SDM yang maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan. Adapun penurunan persentase capaian dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh turunnya harga komoditas. *Gap* tersebut ditutup dengan memaksimalkan seluruh sektor potensial dengan pengawasan melekat.
  - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
    - Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan;
    - Melaksanakan FGD dengan *stakeholder*;
    - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial;
    - Memanfaatkan penggunaan teknologi;
    - Melakukan pengumpulan data lapangan/ekstensifikasi;
    - Memperkuat basis data.
  - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, tidak meratanya kemampuan bayar wajib pajak, dan penurunan harga komoditas. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:
    - Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;



- Meningkatkan edukasi dan pengawasan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak potensial;
  - Pengawasan kewajiban Instansi Pemerintah dengan memperhatikan pagu dan realisasinya;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara); dan
  - Pengawasan kewajiban pembayaran masa (PPH Pasal 21, PPh Pasal 4(2) PP 55 2023, PPh Pasal 25, PPN) yang dilakukan wajib pajak.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari sumber baru PKP baru dari sektor sawit maupun sektor lainnya</li> </ul>	2025



<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah</li><li>• Meningkatkan pengawasan perpajakan dan komunikasi kepada WP Penentu penerimaan</li><li>• Meningkatkan edukasi dan pengawasan pemenuhan perpajakan Kelompok Tani dan Petani Sawit</li><li>• Sharing knowledge internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara)</li><li>• Meningkatkan penerbitan SP2DK yang berkualitas dengan memanfaatkan DSPP</li></ul>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	94,35	98,91	98,91	94,86	94,86	91,55	91,55
Capaian	94,35	98,91	98,91	94,86	94,86	91,55	91,55

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### b. Definisi IKU :

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

#### c. Formula IKU :

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

#### d. Realisasi IKU :

IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2024 tercapai sebesar 91,55. Hal yang menjadi tantangan pemenuhan IKU ini adalah harga komoditas sawit yang turun, begitu pula kemampuan wajib pajak secara umum.

### 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto (lama)	100%	-	-	-	-



Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (lama)	-	120%	76,92%	-	-
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (baru)	-	-	-	104,74	91,55

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian IKU pertumbuhan bruto mengalami fluktuasi. Tantangan utamanya disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas sawit. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain:

- i) Memanfaatkan data billing terbentuk;
- ii) Mengkombinasikan metode penghitungan berdasarkan statistik dan perhitungan dari Seksi Pengawasan;
- iii) Meningkatkan koordinasi antara AR dengan WP Dengan jangka waktu ditentukan (tgl 15 pada saat upload faktur dan sebelum tanggal 30 saat SPM bendahara);
- iv) Koordinasi internal mengenai potensi restitusi antara Seksi pelayanan, Seksi PKD, dan Seksi pengawasan;
- v) Melakukan persuasi kepada WP yang LB kompensasinya besar terkait manajemen restitusi;
- vi) Pengawasan faktur pajak keluaran dan pajak masukan WP penentu penerimaan untuk prognosa penerimaan.

### 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Memanfaatkan data *billing* terbentuk;
  - Mengkombinasikan metode penghitungan berdasarkan statistik dan perhitungan dari Seksi Pengawasan;
  - Meningkatkan koordinasi antara AR dengan WP Dengan jangka waktu ditentukan (tgl 15 pada saat upload faktur dan sebelum tanggal 30 saat SPM bendahara);
  - Koordinasi internal mengenai potensi restitusi antara Seksi pelayanan, Seksi PKD, dan Seksi pengawasan;
  - Melakukan persuasi kepada WP yang LB kompensasinya besar terkait manajemen restitusi;
  - Pengawasan faktur pajak keluaran dan pajak masukan WP penentu penerimaan untuk prognosa penerimaan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas dan manajemen SDM yang maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan. Adapun



penurunan indeks capaian dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan seluruh sektor potensial dengan pengawasan melekat.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Langkah efisiensi sumber daya organisasi yang telah dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan;
  - Melaksanakan FGD dengan *stakeholder*;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial;
  - Memanfaatkan penggunaan teknologi;
  - Melakukan pengumpulan data lapangan/ekstensifikasi;
  - Memperkuat basis data.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, tidak meratanya kemampuan bayar wajib pajak, dan penurunan harga komoditas. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:
  - Memanfaatkan data *billing* terbentuk;
  - Mengkombinasikan metode penghitungan berdasarkan statistik dan perhitungan dari Seksi Pengawasan;
  - Meningkatkan koordinasi antara AR dengan WP Dengan jangka waktu ditentukan (tgl 15 pada saat upload faktur dan sebelum tanggal 30 saat SPM bendahara);
  - Koordinasi internal mengenai potensi restitusi antara Seksi pelayanan, Seksi PKD, dan Seksi pengawasan;
  - Melakukan persuasi kepada WP yang LB kompensasinya besar terkait manajemen restitusi;
  - Pengawasan faktur pajak keluaran dan pajak masukan WP penentu penerimaan untuk prognosa penerimaan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)



Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi antara AR dengan WP pada jangka waktu yang ditentukan (tgl 15 pada saat upload faktur dan sebelum tanggal 30 saat SPM bendahara)</li> <li>• Koordinasi internal mengenai potensi restitusi antara Seksi pelayanan, Seksi PKD, dan Seksi pengawasan</li> <li>• Pengawasan faktur pajak keluaran dan pajak masukan WP penentu penerimaan untuk prognosa penerimaan</li> </ul>	2025



## IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	12,27%	31,45%	31,45%	53,79%	53,79%	100,01%	100,01%
Capaian	81,80%	78,63%	78,63%	75,76%	75,76%	100,01%	100,01%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* wajib pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

#### b. Definisi IKU :

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### c. Formula IKU :

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM per Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) x 100%

#### d. Realisasi IKU :



Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 100,01%) dengan total penerimaan sebesar Rp659.405.440.699 dari target Rp 659.371.418.000.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	N/A	117,70%	125,92%	105,13%	100,01%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 4 tahun terakhir capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun fluktuasi capaian penerimaan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas khususnya sawit. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja penerimaan adalah:

- i) Penerbitan STP atas Daftar Nominatif yang ada;
- ii) Pengawasan pembayaran rutin wajib pajak;
- iii) Tindak lanjut atas Data Pemicu tahun berjalan yang tersedia di aplikasi;
- iv) Mencari sumber baru PKP baru dari sektor sawit maupun sektor lainnya;
- v) Meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah (Aplikasi APAKAREBA diintensifkan penyampaiannya dengan berita acara);
- vi) Meningkatkan pengawasan perpajakan dan komunikasi kepada WP Penentu penerimaan (sosialisasi kepada PKS dan mitra tani serta WP OP prominen);
- vii) *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, dan bendahara);
- viii) Meningkatkan penerbitan SP2DK yang berkualitas dengan memanfaatkan data pengujian dan analisis mandiri (bedah WP) serta data eksternal (*web crawling* dan data laporan audit dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);
- ix) Meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan bersama Kemenkeu Satu ke Satker Bendaharawan Penentu Penerimaan;
- x) Koordinasi dengan Dinas PTSP Pemprov maupun Kabupaten untuk mendapatkan daftar subjek pelaku usaha;
- xi) Ekstensifikasi PKP khususnya untuk WP pengumpul sektor komoditas pengumpul yang sedang tumbuh (kakao dan sawit).

## 3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y



Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,01%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami kendala dengan adanya penurunan harga komoditas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju bersinergi kuat dengan gencar melakukan pengawasan melekat terhadap sektor dominan dan potensial dan menjalankan seluruh rencana aksi yang telah disusun.

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,01%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional (APBN) yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Penerbitan STP atas Daftar Nominatif yang ada;
  - Pengawasan pembayaran rutin wajib pajak;
  - Tindak lanjut atas Data Pemicu tahun berjalan yang tersedia di aplikasi;



- Mencari sumber baru PKP baru dari sektor sawit maupun sektor lainnya;
  - Meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah (Aplikasi APAKAREBA diintensifkan penyampaiannya dengan berita acara);
  - Meningkatkan pengawasan perpajakan dan komunikasi kepada WP Penentu penerimaan (sosialisasi kepada PKS dan mitra tani serta WP OP prominen);
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, dan bendahara);
  - Meningkatkan penerbitan SP2DK yang berkualitas dengan memanfaatkan data penguji dan analisis mandiri (bedah WP) serta data eksternal (*web crawling* dan data laporan audit dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);
  - Meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan bersama Kemenkeu Satu ke Satker Bendaharawan Penentu Penerimaan;
  - Koordinasi dengan Dinas PTSP Pemprov maupun Kabupaten untuk mendapatkan daftar subjek pelaku usaha;
  - Ekstensifikasi PKP khususnya untuk WP pengumpul sektor komoditas pengumpul yang sedang tumbuh (kakao dan sawit).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas dan manajemen SDM yang maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan. Adapun penurunan persentase capaian dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh turunnya harga komoditas dan menurunkan kemampuan bayar wajib pajak secara umum. *Gap* tersebut ditutup dengan memaksimalkan seluruh sektor potensial dengan pengawasan melekat.
  - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
    - Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan;
    - Melaksanakan FGD dengan *stakeholder*;
    - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial;
    - Memanfaatkan penggunaan teknologi;
    - Melakukan pengumpulan data lapangan/ekstensifikasi;
    - Memperkuat basis data.



- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, tidak meratanya kemampuan bayar wajib pajak, dan penurunan harga komoditas. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:
  - Penerbitan STP atas Daftar Nominatif yang ada;
  - Pengawasan pembayaran rutin wajib pajak;
  - Tindak lanjut atas Data Pemicu tahun berjalan yang tersedia di aplikasi;
  - Mencari sumber baru PKP baru dari sektor sawit maupun sektor lainnya;
  - Meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah (Aplikasi APAKAREBA diintensifkan penyampaianannya dengan berita acara);
  - Meningkatkan pengawasan perpajakan dan komunikasi kepada WP Penentu penerimaan (sosialisasi kepada PKS dan mitra tani serta WP OP prominen);
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, dan bendahara);
  - Meningkatkan penerbitan SP2DK yang berkualitas dengan memanfaatkan data pengujian dan analisis mandiri (bedah WP) serta data eksternal (*web crawling* dan data laporan audit dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);
  - Meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan bersama Kemenkeu Satu ke Satker Bendaharawan Penentu Penerimaan;
  - Koordinasi dengan Dinas PTSP Pemprov maupun Kabupaten untuk mendapatkan daftar subjek pelaku usaha;
  - Ekstensifikasi PKP khususnya untuk WP pengumpul sektor komoditas pengumpul yang sedang tumbuh (kakao dan sawit).
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.



- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi dengan KPPN dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah</li> <li>• Kolaborasi dengan Wajib Pajak Pengusaha Sektor Dominan</li> <li>• Kolaborasi dengan Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit</li> </ul>	2025



## IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	86,62%	101,71%	101,71%	100,38%	100,38%	102,38%	102,38%
Capaian	120%	120%	120%	111,53%	111,53%	102,38%	102,38%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* wajib pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

#### b. Definisi IKU :

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.



Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk wajib pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU :

$$\frac{(1,2 \times a) + b}{c} \times 100\%$$

a = jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT

b = jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT

c = target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 102,38%) dengan jumlah SPT masuk sebanyak 30.036.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	97,86%	104,05%	102,50%	100,83%	102,38%



Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju mengalami fluktuasi dan selalu melampaui target sejak tahun 2021. Adapun tantangan untuk memenuhi target kepatuhan penyampaian SPT dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja adalah:

- i) Membentuk satgas penerimaan SPT Tahunan;
- ii) Melakukan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan melalui *Whatsapp Blast* dengan media *Omnichannel*;
- iii) Melakukan Pojok Pajak ditempat keramaian guna mendapatkan realisasi penerimaan SPT Tahunan yang maksimal;
- iv) Melaksanakan Pekan Panutan guna sebagai dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu;
- v) Gencar dalam melakukan sosialisasi SPT Tahunan secara langsung oleh Asisten Penyuluh dan melalui Sosial Media;
- vi) Melakukan monitoring serta percepatan realisasi SPT Tahunan tahun 2024
- vii) Menerbitkan Surat Teguran bagi WP yang belum lapor;
- viii) Melaksanakan kegiatan penyuluhan *One on One* kepada Wajib Pajak Wajib SPT yang belum melakukan Pelaporan melalui media *Omnichannel* dan Telepon.

### 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Membentuk satgas penerimaan SPT Tahunan;
  - Melakukan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan melalui *Whatsapp Blast* dengan media *Omnichannel*;
  - Melakukan Pojok Pajak ditempat keramaian guna mendapatkan realisasi penerimaan SPT Tahunan yang maksimal;
  - Melaksanakan Pekan Panutan guna sebagai dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu;
  - Gencar dalam melakukan sosialisasi SPT Tahunan secara langsung oleh Asisten Penyuluh dan melalui Sosial Media;
  - Melakukan monitoring serta percepatan realisasi SPT Tahunan tahun 2024
  - Menerbitkan Surat Teguran bagi WP yang belum lapor;
  - Melaksanakan kegiatan penyuluhan *One on One* kepada Wajib Pajak Wajib SPT yang belum melakukan Pelaporan melalui media *Omnichannel* dan Telepon.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Membentuk satgas penerimaan SPT Tahunan;
  - Melakukan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan melalui *Whatsapp Blast* dengan media *Omnichannel*;
  - Membuka Pojok Pajak;
  - Melaksanakan Pekan Panutan;
  - Sosialisasi SPT Tahunan secara langsung maupun melalui Sosial Media;
  - Monitoring serta percepatan realisasi SPT Tahunan Tahun 2024;
  - Penerbitan Surat Teguran bagi WP yang belum lapor;
  - Penyuluhan *One on One* kepada Wajib Pajak Wajib SPT yang belum melakukan Pelaporan melalui media *Omnichannel* dan Telepon.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah rendahnya kesadaran serta kurangnya pemahaman wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakannya. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:
  - Membentuk satgas penerimaan SPT Tahunan;
  - Melakukan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan melalui *Whatsapp Blast* dengan media *Omnichannel*;
  - Melakukan Pojok Pajak ditempat keramaian guna mendapatkan realisasi penerimaan SPT Tahunan yang maksimal;
  - Melaksanakan Pekan Panutan guna sebagai dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Tepat waktu;
  - Gencar dalam melakukan sosialisasi SPT Tahunan secara langsung oleh Asisten Penyuluh dan melalui Sosial Media;
  - Melakukan monitoring serta percepatan realisasi SPT Tahunan tahun 2024



- Menerbitkan Surat Teguran bagi WP yang belum lapor;
  - Melaksanakan kegiatan penyuluhan *One on One* kepada Wajib Pajak Wajib SPT yang belum melakukan Pelaporan melalui media *Omnichannel* dan Telepon.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan himbauan terkait penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak melalui <i>Whatsapp blast</i> dengan media <i>Omnichannel</i></li> <li>• Mengirim himbauan penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak</li> </ul>	2025



<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengadakan sosialisasi dan edukasi tata cara pelaporan SPT Tahunan baik secara daring maupun luring</li><li>• Mengadakan pojok pajak di pusat keramaian dan kantor pemerintah</li><li>• Mengadakan kelas pajak di instansi pemerintah dengan jumlah pegawai yang banyak</li><li>• Mengirimkan surat imbauan kepada instansi pemerintah untuk membuat bukti potong dan memerintahkan pegawainya untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadinya</li><li>• Imbauan melalui media seperti spanduk, radio dan koran</li><li>• Mengadakan pekan panutan kepada pejabat publik dan tokoh masyarakat</li><li>• Membentuk satgas kepatuhan SPT Tahunan</li><li>• Menerbitkan Surat Imbauan kepada pemberi kerja</li><li>• Kunjungan ke wajib pajak</li><li>• Melaksanakan Pekan Panutan</li></ul>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,87%	38,77%	38,77%	42,09%	42,09%	100,91%	100,91%
Capaian	67,48%	77,54%	77,54%	56,12%	56,12%	100,91%	100,91%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi  
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* wajib pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

#### b. Definisi IKU :

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### c. Formula IKU :

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

a = Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM

b = Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM



## d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 100,91%) dengan total penerimaan sebesar Rp27.256.216.885 dari target Rp27.010.193.000.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) (IKU Lama)	N/A	100,68%	111,75%	-	-
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (IKU Baru)	-	-	-	70,11%	100,91%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 4 tahun terakhir capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dari kegiatan pengawasan/pengujian kepatuhan material mengalami fluktuasi. Capaian pada tahun 2021, 2022, dan 2024 melampaui target yang ditentukan. Adapun fluktuasi capaian dipengaruhi oleh kemampuan bayar dan ketidakpatuhan wajib pajak. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja penerimaan adalah:

- i) Penyelesaian SP2DK *outstanding*;
- ii) Melaksanakan bedah Wajib Pajak Strategis;
- iii) Melakukan visit/kunjungan kepada WP yang tidak merespon SP2DK dalam rangka penyelesaian SP2DK;
- iv) Menerbitkan BAP2DK atas komitmen pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;
- v) Usul pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, mengabaikan komitmen yang telah disepakati berdasarkan BAP2DK;
- vi) Melakukan konseling terhadap SP2DK yang telah terbit untuk WP dengan kemampuan bayar yang tinggi;
- vii) Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
- viii) *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara, dan Dana Desa);
- ix) Memaksimalkan potensi pajak SP2DK atas DPP Kolaboratif;
- x) Pembahasan wajib pajak antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa;



xi) Melakukan analisis komprehensif dalam bentuk bedah WP strategis maupun WP lainnya atas data internal (bukti potong PPh Pasal 22/SPT Masa PPN/SPT Tahunan PPh).

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	100,91%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami kendala dengan kemampuan bayar dan ketidakpatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju bersinergi kuat dengan gencar melakukan pengawasan melekat dan pengujian kepatuhan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,91%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional yang ditetapkan.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU



- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Penyelesaian SP2DK *outstanding*;
  - Melaksanakan bedah Wajib Pajak Strategis;
  - Melakukan visit/kunjungan kepada WP yang tidak merespon SP2DK dalam rangka penyelesaian SP2DK;
  - Menerbitkan BAP2DK atas komitmen pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;
  - Usul pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, mengabaikan komitmen yang telah disepakati berdasarkan BAP2DK;
  - Melakukan konseling terhadap SP2DK yang telah terbit untuk WP dengan kemampuan bayar yang tinggi;
  - Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara, dan Dana Desa);
  - Memaksimalkan potensi pajak SP2DK atas DPP Kolaboratif;
  - Pembahasan wajib pajak antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa;
  - Melakukan analisis komprehensif dalam bentuk bedah WP strategis maupun WP lainnya atas data internal (bukti potong PPh Pasal 22/SPT Masa PPN/SPT Tahunan PPh).
  
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan peningkatan kinerja dan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas dan manajemen SDM yang maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan.
  
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, pemanfaatan data perpajakan dengan maksimal, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
  
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Penyelesaian SP2DK *outstanding*;
  - Melaksanakan bedah Wajib Pajak Strategis;
  - Melakukan visit/kunjungan kepada WP yang tidak merespon SP2DK dalam rangka penyelesaian SP2DK;
  - Menerbitkan BAP2DK atas komitmen pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;



- Usul pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, mengabaikan komitmen yang telah disepakati berdasarkan BAP2DK;
  - Melakukan konseling terhadap SP2DK yang telah terbit untuk WP dengan kemampuan bayar yang tinggi;
  - Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara, dan Dana Desa);
  - Memaksimalkan potensi pajak SP2DK atas DPP Kolaboratif;
  - Pembahasan wajib pajak antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa;
  - Melakukan analisis komprehensif dalam bentuk bedah WP strategis maupun WP lainnya atas data internal (bukti potong PPh Pasal 22/SPT Masa PPN/SPT Tahunan PPh);
  - Memperkuat basis data.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah kemampuan bayar dan ketidakpatuhan wajib pajak. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:
    - Penyelesaian SP2DK *outstanding*;
    - Melaksanakan bedah Wajib Pajak Strategis;
    - Melakukan visit/kunjungan kepada WP yang tidak merespon SP2DK dalam rangka penyelesaian SP2DK;
    - Menerbitkan BAP2DK atas komitmen pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;
    - Usul pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan, mengabaikan komitmen yang telah disepakati berdasarkan BAP2DK;
    - Melakukan konseling terhadap SP2DK yang telah terbit untuk WP dengan kemampuan bayar yang tinggi;
    - Menginventarisir dan melakukan komunikasi intens kepada WP Potensial Penentu Penerimaan;
    - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial (sawit, perikanan, perdagangan, bendahara, dan Dana Desa);
    - Memaksimalkan potensi pajak SP2DK atas DPP Kolaboratif;
    - Pembahasan wajib pajak antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa;



- Melakukan analisis komprehensif dalam bentuk bedah WP strategis maupun WP lainnya atas data internal (bukti potong PPh Pasal 22/SPT Masa PPN/SPT Tahunan PPh).
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi antara Pengawasan dan Pemeriksaan</li> <li>• Visit ke wajib pajak</li> <li>• Presentasi bedah wajib pajak oleh AR yang disaksikan komite kepatuhan</li> <li>• Menerbitkan Surat Imbauan</li> </ul>	2025



## IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	22,30%	51,17%	51,17%	85,46%	85,46%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian wajib pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### b. Definisi IKU :

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

3. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
4. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
5. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.



Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

#### c. Formula IKU :

$(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$

#### d. Realisasi IKU :



IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 88,80% dari target 74%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan (lama)	79,47%	80,40%	80,40%		
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (baru)	-	-	-	84%	88,80%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian IKU Persentase efektivitas/perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Melakukan kegiatan layanan di luar kantor secara rutin (Pos Pelayanan Pajak, Pojok Pajak) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan;
- ii) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka pelaporan SPT ASN;
- iii) Pelaksanaan Kelas Pajak bagi Bendahara untuk mempercepat penerbitan bukti potong A2;
- iv) Koordinasi dengan Seksi PKD untuk monitoring ASN/Dinas yang belum melaporkan SPT Tahunan;
- v) Melakukan kegiatan imbauan secara *One on One* kepada wajib pajak sasaran DSP4; dan
- vi) Menyandingkan data pelaporan SPT tahun lalu dan melakukan imbauan.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Melakukan kegiatan layanan di luar kantor secara rutin (Pos Pelayanan Pajak, Pojok Pajak) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan;
  - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka pelaporan SPT ASN;
  - Pelaksanaan Kelas Pajak bagi Bendahara untuk mempercepat penerbitan bukti potong A2;
  - Koordinasi dengan Seksi PKD untuk monitoring ASN/Dinas yang belum melaporkan SPT Tahunan;
  - Melakukan kegiatan imbauan secara *One on One* kepada wajib pajak sasaran DSP4; dan
  - Menyandingkan data pelaporan SPT tahun lalu dan melakukan imbauan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja edukasi dan penyuluhan diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melakukan kegiatan layanan di luar kantor secara rutin (Pos Pelayanan Pajak, Pojok Pajak) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan;
  - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka pelaporan SPT ASN;
  - Pelaksanaan Kelas Pajak bagi Bendahara untuk mempercepat penerbitan bukti potong A2;
  - Koordinasi dengan Seksi PKD untuk monitoring ASN/Dinas yang belum melaporkan SPT Tahunan;
  - Melakukan kegiatan imbauan secara *One on One* kepada wajib pajak sasaran DSP4; dan
  - Menyandingkan data pelaporan SPT tahun lalu dan melakukan imbauan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah masih kurangnya kesadaran dan inisiatif wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahamannya terkait ketentuan perpajakan. Tantangan lainnya adalah kondisi wilayah kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penyuluh sehingga memerlukan upaya yang kuat. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Melakukan kegiatan layanan di luar kantor secara rutin (Pos Pelayanan Pajak, Pojok Pajak) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan;
  - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dalam rangka pelaporan SPT ASN;
  - Pelaksanaan Kelas Pajak bagi Bendahara untuk mempercepat penerbitan bukti potong A2;
  - Koordinasi dengan Seksi PKD untuk monitoring ASN/Dinas yang belum melaporkan SPT Tahunan;



- Melakukan kegiatan imbauan secara *One on One* kepada wajib pajak sasaran DSP4; dan
  - Menyandingkan data pelaporan SPT tahun lalu dan melakukan imbauan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya:

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rutin Melaksanakan Sosialisasi Ketentuan Perpajakan melalui saluran Live Instagram, radio, dan media luring</li> <li>• Berkolaborasi dengan AR dalam melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak yang menjadi data pemicu dalam rangka menentukan DSPT mandiri</li> </ul>	2025



## IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,15%	12,45%	12,45%	18%	18%	109,43%	109,43%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109,43%	109,43%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian wajib pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### b. Definisi IKU :

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap wajib pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.



Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU :

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 109,43%).

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan (lama)	95,28	-	-	-	-
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan (lama)	-	93,13	90,43	82,06	-
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (baru)	-	-	-	-	109,43

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Membuat *list* data wajib pajak yang produk hukumnya tidak sampai ke alamat;
- ii) Memberikan informasi terkait gangguan layanan melalui media sosial kantor;
- iii) Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP;
- iv) Meminta nomor telepon dan alamat terbaru setiap pemohon yang mengajukan permohonan;
- v) Memberikan informasi berkala terkait gangguan layanan baik terkait pendaftaran maupun pelaporan SPT Tahunan (djponline); dan
- vi) Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP.



3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	109,43%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami tantangan seperti dengan adanya kendala teknis pelayanan yang kadang muncul, kurangnya jumlah penyuluh pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terkait dengan pertanyaan survei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju senantiasa melaksanakan rencana kerja dengan optimal, memberikan pelayanan dengan maksimal, dan berinovasi sehingga capaian kinerja dapat melampaui target.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	109,43%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional yang ditetapkan.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Membuat *list* data wajib pajak yang produk hukumnya tidak sampai ke alamat;
  - Memberikan informasi terkait gangguan layanan melalui media sosial kantor;



- Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP;
  - Meminta nomor telepon dan alamat terbaru setiap pemohon yang mengajukan permohonan;
  - Memberikan informasi berkala terkait gangguan layanan baik terkait pendaftaran maupun pelaporan SPT Tahunan (djponline); dan
  - Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
  - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
    - Membuat *list* data wajib pajak yang produk hukumnya tidak sampai ke alamat;
    - Memberikan informasi terkait gangguan layanan melalui media sosial kantor;
    - Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP;
    - Meminta nomor telepon dan alamat terbaru setiap pemohon yang mengajukan permohonan;
    - Memberikan informasi berkala terkait gangguan layanan baik terkait pendaftaran maupun pelaporan SPT Tahunan (djponline); dan
    - Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP.
  - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah adanya kendala teknis pelayanan yang kadang muncul, kurangnya jumlah penyuluh pajak, dan tingkat



pemahaman wajib pajak terkait dengan pertanyaan survei. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Membuat *list* data wajib pajak yang produk hukumnya tidak sampai ke alamat;
  - Memberikan informasi terkait gangguan layanan melalui media sosial kantor;
  - Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP;
  - Meminta nomor telepon dan alamat terbaru setiap pemohon yang mengajukan permohonan;
  - Memberikan informasi berkala terkait gangguan layanan baik terkait pendaftaran maupun pelaporan SPT Tahunan (djponline); dan
  - Menjelaskan tentang definisi biaya layanan pajak secara lisan maupun tertulis di ruang TPT atau di tempat layanan WP.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.



## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menginformasikan kepada wajib pajak terkait Inovasi Satu Nomor (permohonan dan konsultasi) ketika pelayanan berlangsung.</li><li>• Rutin menambah kegiatan layanan perpajakan diluar kantor secara rutin dan terjadwal (pos pajak dimall, arteri, event-event daerah)</li><li>• Menghimbau WP untuk mengisi survei setelah melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyuluhan</li><li>• Melakukan pelayanan prima di setiap kegiatan pelayanan dan penyuluhan yang berkualitas</li></ul>	2025



## IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	134,88%	115,84%	115,84%	115,14%	115,14%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

#### b. Definisi IKU :

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

#### c. Formula IKU :

$$(50\% \times a) + (50\% \times b)$$

a = Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

b = Persentase pengawasan pembayaran masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

#### d. Realisasi IKU :

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 120% dari target 90%.



2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	N/A	95,78%	103,85%	117,94%	120%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa mulai diukur sejak 2021. Selama 4 tahun terakhir capaian IKU selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Tindak lanjut Data Pemicu, Data Penguji tahun berjalan;
- ii) Menindaklanjuti data DSE;
- iii) Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP;
- iv) Penelitian Dinamisasi PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang mengalami kenaikan pembayaran pajak.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	100%	-	90%	120%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami kendala dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, penurunan harga komoditas dan menurunnya kemampuan bayar wajib pajak secara umum, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju bersinergi kuat dengan gencar melakukan pengawasan melekat dan merealisasikan seluruh rencana aksi yang telah disusun.



#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	120%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Persentase pengawasan pembayaran masa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di Tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Tindak lanjut Data Pemicu, Data Penguji tahun berjalan;
  - Menindaklanjuti data DSE;
  - Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP;
  - Penelitian Dinamisasi PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang mengalami kenaikan pembayaran pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan;
  - Melaksanakan FGD dengan *stakeholder*;
  - *Sharing knowledge* internal terkait sektor potensial;
  - Memanfaatkan penggunaan teknologi;
  - Menindaklanjuti dan memperkuat basis data.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja



Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, penurunan harga komoditas, tidak meratanya kemampuan bayar serta menurunnya kemampuan bayar wajib pajak secara umum. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Tindak lanjut Data Pemicu, Data Penguji tahun berjalan;
  - Menindaklanjuti data DSE;
  - Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP;
  - Penelitian Dinamisasi PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang mengalami kenaikan pembayaran pajak.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.



- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menerbitkan STP</li><li>• Menerbitkan Surat Imbauan</li><li>• Menerbitkan Surat Imbauan Dinamisasi</li><li>• KPDL dan <i>Canvassing</i></li></ul>	2025



## IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	55,52%	120%	120%	115,41%	115,41%	120%	120%
Capaian	55,52%	120%	120%	115,41%	115,41%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU :

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis; dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan).

#### c. Formula IKU :

$$(50\% \times a) + (50\% \times b)$$

a = Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

b = Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

#### d. Realisasi IKU :

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%



## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	118,58%	120%	120%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Menindaklanjuti DPP Kolaboratif dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
- ii) Koordinasi dengan KPPN untuk memperoleh data PAGU unit vertikal dan pemerintah daerah;
- iii) Kolaborasi Pengawasan dan Pemeriksaan terkait penanganan Wajib Pajak Group;
- iv) Melaksanakan sosialisasi terkait kepatuhan pembayaran pajak;
- v) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
- vi) Penelitian data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan guna menentukan wajib pajak yang akan diusulkan menjadi DPP *Mandatory*;
- vii) Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak guna mengetahui proses bisnis, penggalian potensi pajak, dan terutama untuk wajib pajak dalam penyelesaian SP2DK DPP;
- viii) Menjaga konsistensi penyelesaian SE-05 (penyelesaian jangka waktu LHPT, SP2DK, dan LHP2DK) dan eksekusi pemeriksaan data konkret atas WP yang tidak kooperatif.

## 3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data	100%	100%	-	100%	120%



dan/atau  
keterangan

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami tantangan dengan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju senantiasa bersinergi kuat, melakukan pemanfaatan data yang akurat, dan berinovasi sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Indeks Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional yang ditetapkan.

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Menindaklanjuti DPP Kolaboratif dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
  - Koordinasi dengan KPPN untuk memperoleh data PAGU unit vertikal dan pemerintah daerah;
  - Kolaborasi Pengawasan dan Pemeriksaan terkait penanganan Wajib Pajak Group;
  - Melaksanakan sosialisasi terkait kepatuhan pembayaran pajak;
  - Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
  - Penelitian data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan guna menentukan wajib pajak yang akan diusulkan menjadi DPP *Mandatory*;
  - Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak guna mengetahui proses bisnis, penggalan potensi pajak, dan terutama untuk wajib pajak dalam penyelesaian SP2DK DPP;
  - Menjaga konsistensi penyelesaian SE-05 (penyelesaian jangka waktu LHPt, SP2DK, dan LHP2DK) dan eksekusi pemeriksaan data konkret atas WP yang tidak kooperatif.



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Menindaklanjuti DPP Kolaboratif dengan memanfaatkan data pemicu, data pengujian, maupun analisis mandiri;
  - Koordinasi dengan KPPN untuk memperoleh data PAGU unit vertikal dan pemerintah daerah;
  - Kolaborasi Pengawasan dan Pemeriksaan terkait penanganan Wajib Pajak Group;
  - Melaksanakan sosialisasi terkait kepatuhan pembayaran pajak;
  - Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* dengan memanfaatkan data pemicu, data pengujian, maupun analisis mandiri;
  - Penelitian data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan guna menentukan wajib pajak yang akan diusulkan menjadi DPP *Mandatory*;
  - Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak guna mengetahui proses bisnis, penggalan potensi pajak, dan terutama untuk wajib pajak dalam penyelesaian SP2DK DPP;
  - Menjaga konsistensi penyelesaian SE-05 (penyelesaian jangka waktu LHPt, SP2DK, dan LHP2DK) dan eksekusi pemeriksaan data konkret atas WP yang tidak kooperatif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah adanya kendala teknis pelayanan yang kadang muncul, kurangnya jumlah penyuluh pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terkait dengan pertanyaan survei. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:



- Menindaklanjuti DPP Kolaboratif dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
  - Koordinasi dengan KPPN untuk memperoleh data PAGU unit vertikal dan pemerintah daerah;
  - Kolaborasi Pengawasan dan Pemeriksaan terkait penanganan Wajib Pajak Group;
  - Melaksanakan sosialisasi terkait kepatuhan pembayaran pajak;
  - Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding* dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri;
  - Penelitian data internal dan data eksternal serta hasil pengamatan guna menentukan wajib pajak yang akan diusulkan menjadi DPP *Mandatory*;
  - Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak guna mengetahui proses bisnis, penggalan potensi pajak, dan terutama untuk wajib pajak dalam penyelesaian SP2DK DPP;
  - Menjaga konsistensi penyelesaian SE-05 (penyelesaian jangka waktu LHPt, SP2DK, dan LHP2DK) dan eksekusi pemeriksaan data konkret atas WP yang tidak kooperatif.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.



- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaporkan Proses Penyelesaian SP2DK secara Periodik</li><li>• Melaksanakan visit ke wajib pajak</li><li>• Menutup SP2DK yang telah selesai</li></ul>	2025



## IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,28%	111,50%	111,50%	116,56%	116,56%	120%	120%
Capaian	109,28%	111,50%	111,50%	116,56%	116,56%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU :

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

##### 1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

##### a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- Jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - o triwulan I: sampai dengan bulan Februari;



- o triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - o triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - o triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 2) Pemanfaatan Data Matching
- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.



e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU :

$$\frac{a + b}{2}$$

a = Capaian pemanfaatan data STP

b = Capaian pemanfaatan *Data Matching*

d. Realisasi IKU :

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	117,61%	120%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mulai diukur sejak 2023. Selama 2 tahun, capaian IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Menerbitkan STP selain tahun berjalan;
- ii) Melakukan tindak lanjut data pemicu;
- iii) Membuat LHPT atas data pemicu yang sudah dimasukkan pada DPP Kolaboratif;
- iv) Mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT atas data pemicu yang telah dilakukan pembayaran.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Menerbitkan STP selain tahun berjalan;
  - Melakukan tindak lanjut data pemicu;
  - Membuat LHPT atas data pemicu yang sudah dimasukkan pada DPP Kolaboratif;
  - Mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT atas data pemicu yang telah dilakukan pembayaran.



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Memperkuat basis data
  - Menerbitkan STP selain tahun berjalan;
  - Melakukan tindak lanjut data pemicu;
  - Membuat LHPT atas data pemicu yang sudah dimasukkan pada DPP Kolaboratif;
  - Mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT atas data pemicu yang telah dilakukan pembayaran.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah masih kurangnya kesadaran dan inisiatif wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta terdapatnya data pemicu yang tidak memiliki potensi namun harus ditindaklanjuti. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Memperkuat basis data
  - Menerbitkan STP selain tahun berjalan;
  - Melakukan tindak lanjut data pemicu;
  - Membuat LHPT atas data pemicu yang sudah dimasukkan pada DPP Kolaboratif;
  - Mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT atas data pemicu yang telah dilakukan pembayaran.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:



- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan STP</li> <li>• Menginventarisir data pemicu selain tahun berjalan</li> <li>• Membuat LHPt atas data pemicu yang sudah dimasukkan pada DPP Kolaboratif</li> </ul>	2025



## IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	101,03%	101,03%	118,16%	118,16%
Capaian	120%	120%	120%	101,03%	101,03%	118,16%	118,16%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### b. Definisi IKU :

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### c. Formula IKU :

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

#### d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 118,16%) dengan realisasi 118,16% dari target 100%.



## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	118,16%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru mulai diukur sejak tahun 2024 sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
 Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Rapat komite kepatuhan;
  - Penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
  - Penyiapan bahan baku pemeriksaan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
 Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal, pemanfaatan data yang optimal, serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
 Capaian atas kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
 Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Rapat komite kepatuhan;
  - Penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
  - Penyiapan bahan baku pemeriksaan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
 Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.



- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah resistensi dari wajib pajak. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Rapat komite kepatuhan;
  - Penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
  - Penyiapan bahan baku pemeriksaan.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.



## 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>Rapat Komite Kepatuhan</li><li>Penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)</li><li>Evaluasi atas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak</li></ul>	2025



## IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	92,12%	92%	92%	100,80%	100,80%	120%	120%
Capaian	92,12%	92%	92%	100,80%	100,80%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### b. Definisi IKU :

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

#### c. Formula IKU :

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

#### d. Realisasi IKU :

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%.



## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan (lama)	115,34%	112,69%	103,13%	104,16%	-
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (baru)	-	-	-	-	120%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun sejak tahun 2020 capaian IKU selalu maksimal (120%). Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

- i) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi setiap akhir bulan;
- ii) Melakukan Monitoring Daftar Tunggakan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak;
- iii) Mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk meningkatkan variabel IKU;
- iv) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi DSPP Kolaboratif.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi setiap akhir bulan;
  - Melakukan Monitoring Daftar Tunggakan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak;
  - Mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk meningkatkan variabel IKU;
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi DSPP Kolaboratif.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal, pemanfaatan data yang optimal, serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan..
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi setiap akhir bulan;
  - Melakukan Monitoring Daftar Tunggakan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak;
  - Mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk meningkatkan variabel IKU;
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi DSPP Kolaboratif.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah resistensi dari wajib pajak. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi setiap akhir bulan;
  - Melakukan Monitoring Daftar Tunggakan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak;
  - Mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk meningkatkan variabel IKU;
  - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi DSPP Kolaboratif.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem



Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingatkan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan untuk meningkatkan variabel IKU</li> <li>• Perbaharuan Dashboard Pemeriksaan</li> <li>• Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemeriksaan</li> <li>• Prioritas Pemeriksaan (DSPP) Kolaboratif</li> </ul>	2025



## IKU Tingkat efektivitas penagihan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	50%	50%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	36,34%	71,42%	71,42%	88,81%	88,81%	97,15%	97,15%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### b. Definisi IKU :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### c. Formula IKU :

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

#### d. Realisasi IKU :

IKU Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 97,15% dari target 75%.



## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas penagihan (lama)	N/A	116,78%			
Tingkat efektivitas penagihan (baru)	N/A	-	117,43%	104,32%	97,15%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Sejak tahun 2021 capaian IKU terkait efektivitas penagihan selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Monitoring rekening WP yang dapat dilakukan penyitaan;
- ii) Optimalisasi tinpen bendahara yang termasuk dalam DSPC;
- iii) Tindak lanjut Pbk atas rekening yang telah diblokir;
- iv) Permintaan rekening wajib pajak dan *profiling* untuk pencegahan;
- v) Permintaan tindak lanjut *asset tracing* ke Kanwil; dan
- vi) Melakukan percepatan tindakan penagihan.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Monitoring rekening WP yang dapat dilakukan penyitaan;
  - Optimalisasi tinpen bendahara yang termasuk dalam DSPC;
  - Tindak lanjut Pbk atas rekening yang telah diblokir;
  - Permintaan rekening wajib pajak dan *profiling* untuk pencegahan;
  - Permintaan tindak lanjut *asset tracing* ke Kanwil; dan
  - Melakukan percepatan tindakan penagihan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal, pemanfaatan data yang optimal, serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:



- Monitoring rekening WP yang dapat dilakukan penyitaan;
  - Optimalisasi tinpen bendahara yang termasuk dalam DSPC;
  - Tindak lanjut Pbk atas rekening yang telah diblokir;
  - Permintaan rekening wajib pajak dan *profiling* untuk pencegahan;
  - Permintaan tindak lanjut *asset tracing* ke Kanwil; dan
  - Melakukan percepatan tindakan penagihan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah resistensi dari wajib pajak. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
    - Monitoring rekening WP yang dapat dilakukan penyitaan;
    - Optimalisasi tinpen bendahara yang termasuk dalam DSPC;
    - Tindak lanjut Pbk atas rekening yang telah diblokir;
    - Permintaan rekening wajib pajak dan *profiling* untuk pencegahan;
    - Permintaan tindak lanjut *asset tracing* ke Kanwil; dan
    - Melakukan percepatan tindakan penagihan.
  - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:



- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Permintaan rekening wajib pajak dan <i>profiling</i> untuk Pencegahan</li><li>• Permintaan tindak lanjut <i>asset tracing</i> ke kanwil</li><li>• Melakukan percepatan tindakan penagihan</li></ul>	2025



## IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### b. Definisi IKU :

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik wajib pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas wajib pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas wajib pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi



Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah wajib pajak. Satu usulan untuk satu wajib pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas wajib pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU :

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU :

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 tidak tercapai (0%). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju telah berupaya mengajukan beberapa usulan namun seluruhnya tidak disetujui.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan (lama)	N/A	N/A	N/A	100%	-
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (baru)	N/A	N/A	N/A	-	0%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor



Terdapat perubahan IKU dari tahun 2023. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mulai diukur sejak tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- i) *Profiling* dan inventarisasi WP suspect bukper dari proses penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
- ii) Melakukan pembahasan internal di tingkat KPP;
- iii) Koordinasi (*case building*) dengan penyidik di Kanwil terkait penentuan wajib pajak *suspect*;
- iv) Pengiriman usulan wajib pajak bukti permulaan ke Kanwil;
- v) Inventarisasi *tax gap* yang tinggi dan wajib pajak yang mempunyai kriteria tertentu (wajib pajak *suspend*).

### 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - *Profiling* dan inventarisasi WP suspect bukper dari proses penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
  - Melakukan pembahasan internal di tingkat KPP;
  - Koordinasi (*case building*) dengan penyidik di Kanwil terkait penentuan wajib pajak *suspect*;
  - Pengiriman usulan wajib pajak bukti permulaan ke Kanwil;
  - Inventarisasi *tax gap* yang tinggi dan wajib pajak yang mempunyai kriteria tertentu (wajib pajak *suspend*).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Telah dilakukan 5 kali usulan pemeriksaan bukti permulaan melalui ND-670/KPP.1513/2024 tanggal 27 Juni 2024, ND-674/KPP.1513/2024 tanggal 28 Juni 2024, ND-675/KPP.1513/2024 tanggal 28 Juni 2024, ND-676/KPP.1513/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan ND-1180/KPP.1513/2024 tanggal 16 Oktober 2024. IKU tidak tercapai dikarenakan wajib pajak yang diusulkan membayar potensi kerugian negara. Selain itu wajib pajak lain yang diusulkan dianggap tidak memenuhi unsur pidana oleh Tim dari Kanwil.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Meskipun IKU tidak mencapai target, namun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju telah melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan:



- *Profiling* dan inventarisasi WP suspect bukper dari proses penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
  - Melakukan pembahasan internal di tingkat KPP;
  - Koordinasi (*case building*) dengan penyidik di Kanwil terkait penentuan wajib pajak *Suspect*;
  - Pengiriman usulan wajib pajak bukti permulaan ke Kanwil;
  - Inventarisasi *tax gap* yang tinggi dan wajib pajak yang mempunyai kriteria tertentu (wajib pajak *Suspend*).
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan/atau mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah wajib pajak membayar potensi kerugian negara sebelum penelaahan Bukper dan berdasarkan hasil penelaahan Kanwil, unsur tindak pidana belum terpenuhi. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
    - *Profiling* dan inventarisasi WP suspect bukper dari proses penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
    - Melakukan pembahasan internal di tingkat KPP;
    - Koordinasi (*case building*) dengan penyidik di Kanwil terkait penentuan wajib pajak *suspect*;
    - Pengiriman usulan wajib pajak bukti permulaan ke Kanwil;
    - Inventarisasi *tax gap* yang tinggi dan wajib pajak yang mempunyai kriteria tertentu (wajib pajak *suspend*).
  - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem



Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Profiling</i> dan inventarisasi WP <i>suspect</i> bukper dari proses penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan</li> <li>• Melakukan pembahasan internal di tingkat KPP</li> <li>• Koordinasi (<i>case building</i>) dengan penyidik di Kanwil terkait penentuan wajib pajak <i>suspect</i></li> <li>• Pengiriman usulan wajib pajak bukti permulaan ke Kanwil</li> <li>• Memonitoring Usulan Pemeriksaan yang telah dikirim melalui Aplikasi PortalP2</li> </ul>	2025



## IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	7,75%	91,92%	91,92%	116,50%	116,50%	120%	120%
Capaian	38,75%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### b. Definisi IKU :

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

#### c. Formula IKU :

$$\frac{a + b}{2} \times 100\%$$

a = Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

b = Persentase penyediaan data potensi perpajakan

#### d. Realisasi IKU :

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%.

### 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan (lama)	174,31%	140,68%	132,87%	-	-
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (baru)	-	-	-	146,93%	120%

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor



Selama 5 tahun berturut-turut capaian IKU terkait penyediaan data potensi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Melakukan *canvassing*/penyisiran pusat pusat kegiatan ekonomi;
- ii) Memanfaatkan data dari Faktur Pajak, Bukti Potong dan data lainnya;
- iii) Pemanfaatan data perijinan, retribusi, DTH RTH yang dimiliki pemerintah daerah, unit kerja lainnya;
- iv) Membuat SK Tim Pengamat;
- v) Membuat target pengamatan;
- vi) Mempercepat perekaman data pada aplikasi KPDL.

## 2. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Melakukan *canvassing*/penyisiran pusat pusat kegiatan ekonomi;
  - Memanfaatkan data dari Faktur Pajak, Bukti Potong dan data lainnya;
  - Pemanfaatan data perijinan, retribusi, DTH RTH yang dimiliki pemerintah daerah, unit kerja lainnya;
  - Membuat SK Tim Pengamat;
  - Membuat target pengamatan;
  - Mempercepat perekaman data pada aplikasi KPDL.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melakukan *canvassing*/penyisiran pusat pusat kegiatan ekonomi;
  - Memanfaatkan data dari Faktur Pajak, Bukti Potong dan data lainnya;



- Pemanfaatan data perijinan, retribusi, DTH RTH yang dimiliki pemerintah daerah, unit kerja lainnya;
  - Membuat SK Tim Pengamat;
  - Membuat target pengamatan;
  - Mempercepat perekaman data pada aplikasi KPDL.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
  - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di Tahun 2024 adalah wajib pajak belum menyampaikan data aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
    - Melakukan *canvassing*/penyisiran pusat pusat kegiatan ekonomi;
    - Memanfaatkan data dari Faktur Pajak, Bukti Potong dan data lainnya;
    - Pemanfaatan data perijinan, retribusi, DTH RTH yang dimiliki pemerintah daerah, unit kerja lainnya;
    - Membuat SK Tim Pengamat;
    - Membuat target pengamatan;
    - Mempercepat perekaman data pada aplikasi KPDL.
  - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:



- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### 3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Tim Pengamatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamatan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengamatan</li> <li>• Membentuk Tim Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang melibatkan semua pegawai untuk menanggulangi kekurangan pegawai, melaksanakan kegiatan KPDL serta melakukan pemantauan berkala atas capaian IKU</li> </ul>	2025



## IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,15%	40,33%	40,33%	63,09%	63,09%	75,02%	75,02%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### b. Definisi IKU :

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

#### c. Formula IKU :

$$\left[ 70\% \times \left( \left( \frac{a}{b} \times 40\% \right) + \left( \frac{c}{d} \times 60\% \right) \right) \right] + \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{e}{f} \times 40\% \right) + \left( \frac{g}{h} \times 60\% \right) \right) \right]$$

a = Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan

b = Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan

c = Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap

d = Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan

e = Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan

f = Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan



g = Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap

h = Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan

d. Realisasi IKU :

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120%) dengan realisasi sebesar 75,02% dari target 55%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	N/A	N/A	N/A	84,44%	75,02

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mulai diukur sejak tahun 2023. Selama 2 tahun berturut-turut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju memiliki capaian IKU maksimal. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah;

- i) Menggiatkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah pemilik data baik secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
- ii) Melakukan konfirmasi secara berkala ke pihak eksternal pemilik data serta koordinasi secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
- iii) Memberikan pengertian kepada pihak eksternal terkait pemanfaatan data yang dihimpun oleh KPP dalam bentuk sosialisasi maupun informal.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Menggiatkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah pemilik data baik secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Melakukan konfirmasi secara berkala ke pihak eksternal pemilik data serta koordinasi secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Memberikan pengertian kepada pihak eksternal terkait pemanfaatan data yang dihimpun oleh KPP dalam bentuk sosialisasi maupun informal.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Menggiatkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah pemilik data baik secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Melakukan konfirmasi secara berkala ke pihak eksternal pemilik data serta koordinasi secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Memberikan pengertian kepada pihak eksternal terkait pemanfaatan data yang dihimpun oleh KPP dalam bentuk sosialisasi maupun informal.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah instansi daerah pemilik data belum mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai manfaat penyaluran data, pihak eksternal terlalu lama dalam memberikan data ILAP, data yang kurang lengkap. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Menggiatkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah pemilik data baik secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Melakukan konfirmasi secara berkala ke pihak eksternal pemilik data serta koordinasi secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat);
  - Memberikan pengertian kepada pihak eksternal terkait pemanfaatan data yang dihimpun oleh KPP dalam bentuk sosialisasi maupun informal.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.



- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan konfirmasi secara berkala ke pihak eksternal pemilik data serta koordinasi secara formal (surat) maupun secara informal (telepon dan chat)</li> <li>• Memberikan sosialisasi kepada pihak eksternal terkait pemanfaatan data yang dihimpun oleh KPP dalam bentuk sosialisasi maupun informal</li> </ul>	2025



## IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	185,53	185,53	114,22	114,22	117,46	117,46
Capaian	120	120	120	114,22	114,22	117,46	117,46

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### b. Definisi IKU :

##### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 (tiga) Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

##### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.



## c. Formula IKU :

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

Keterangan: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

## d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 117,46) dengan dengan realisasi sebesar 117,46 dari target 100.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan (lama)	100%	-	-	-	-
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi (lama)	-	79,37%	89,02%	100%	-
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (baru)	-	-	-	-	117,46

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun berturut-turut capaian IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis/IHT;
- ii) Menyiapkan Pengawas & *IT Support* untuk *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon IV;
- iii) Menyiapkan sarana tempat dan PC untuk para peserta Ujian Kompetensi Teknis.

## 3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis/ IHT;
  - Menyiapkan Pengawas & *IT Support* untuk *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon IV;
  - Menyiapkan sarana tempat dan PC untuk para peserta Ujian Kompetensi Teknis.



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas IKU diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis/ IHT;
  - Menyiapkan Pengawas & *IT Support* untuk *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon IV;
  - Menyiapkan sarana tempat dan PC untuk para peserta Ujian Kompetensi Teknis.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah kesadaran/inisiatif dari pegawai untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis/ IHT;
  - Menyiapkan Pengawas & *IT Support* untuk *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon IV;
  - Menyiapkan sarana tempat dan PC untuk para peserta Ujian Kompetensi Teknis.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.



- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis/ IHT</li> <li>• Menyiapkan Pengawas &amp; <i>IT Support</i> untuk <i>Assessment Center</i> bagi Pejabat Eselon IV</li> <li>• Menyiapkan sarana tempat dan PC untuk para peserta Ujian Kompetensi Teknis</li> </ul>	2025



## IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96,97	96,97
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	114,08	114,08

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### b. Definisi IKU :

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (wajib pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

#### c. Formula IKU :

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

#### d. Realisasi IKU :

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 114,08) dengan dengan realisasi sebesar 96,97 dari target 85.



## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	95,5	94,43	94,91	96,97

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mulai diukur sejak tahun 2021. Selama 4 tahun berturut-turut capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Berkoordinasi dengan pengampu proses bisnis untuk mengumpulkan WP yang dapat menjadi responden survei SPIU;
- ii) Mengirimkan daftar calon responden tepat waktu;
- iii) Memersuasi responden untuk mengisi survei tepat waktu.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Berkoordinasi dengan pengampu proses bisnis untuk mengumpulkan WP yang dapat menjadi responden survei SPIU;
  - Mengirimkan daftar calon responden tepat waktu;
  - Memersuasi responden untuk mengisi survei tepat waktu.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh sinergi dalam pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Berkoordinasi dengan pengampu proses bisnis untuk mengumpulkan WP yang dapat menjadi responden survei SPIU;
  - Mengirimkan daftar calon responden tepat waktu;



- Memersuasi responden untuk mengisi survei tepat waktu.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini adalah sikap responden yang kurang partisipatif dan perlu diingatkan berkali-kali agar mau mengisi survei. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Berkoordinasi dengan pengampu proses bisnis untuk mengumpulkan WP yang dapat menjadi responden survei SPIU;
  - Mengirimkan daftar calon responden tepat waktu;
  - Memersuasi responden untuk mengisi survei tepat waktu.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.



- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengirim daftar calon responden survei secara tepat waktu</li><li>• Berkoordinasi ke seksi terkait untuk mengingatkan wajib pajak dalam hal pengisian survei serta mengirimkan WA dari nomor resmi KPP</li></ul>	2025



## IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

### 1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	28,30	65,56	65,56	89,38	89,38	98,88	98,88
Capaian	120	120	120	120	120	109,87	109,87

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### b. Definisi IKU :

##### 1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

##### 2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan



untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c. Formula IKU :

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU :

Capaian IKU ndeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan (tercapai 109,87) dengan realisasi sebesar 98,88 dari target 90.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan (lama)	99,52%	99,34%	99,65%	-	-
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko (lama)	-	-	-	99,79%	-
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (baru)	-	-	-	-	98,88

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor



Selama 5 tahun berturut-turut capaian IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja IKU adalah:

- i) Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- ii) Memastikan agar seluruh rencana aksi mitigasi risiko terlaksana;
- iii) Mengadakan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.

### 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR tepat waktu dan sesuai ketentuan;
  - Memastikan agar seluruh rencana aksi mitigasi risiko terlaksana;
  - Mengadakan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR tepat waktu dan sesuai ketentuan;
  - Memastikan agar seluruh rencana aksi mitigasi risiko terlaksana;
  - Mengadakan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah data NKO yang kurang update sehingga rapat DKO tidak dapat dilakukan secara lebih cepat. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:



- Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR tepat waktu dan sesuai ketentuan;
  - Memastikan agar seluruh rencana aksi mitigasi risiko terlaksana;
  - Mengadakan kegiatan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
    - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat DKO dan Pemantauan MR serta melakukan imbauan manajemen kinerja</li> <li>• Mengingat akan seksi terkait akan mitigasi Risiko yang belum mencapai target</li> </ul>	2025



## IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

#### b. Definisi IKU :

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

#### c. Formula IKU :

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 Pasal (7)

Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)



Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

d. Realisasi IKU :

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024 memiliki capaian maksimal (120) dengan realisasi sebesar 120 dari target 100. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pembelajaran dari ketidaksempurnaan capaian tahun 2023, terutama pada Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU Lama)	95,78%	97,21%	96,64%	-	-
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKU Baru)	-	-	-	91,81	120

Sumber: Keputusan tentang Hasil Validasi NKO dan Aplikasi Mandor

Selama 5 tahun terakhir capaian IKU terkait kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju selalu melampaui target yang telah ditetapkan dan di tahun 2024 berhasil mendapatkan capaian maksimal. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

- i) Melakukan koordinasi antara Kepala Kantor, PPK, Kasuki, Bendahara, dan PBJ terkait rencana anggaran dan belanja;
- ii) Mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kinerja di tahun-tahun sebelumnya;
- iii) Melakukan monitoring IKPA secara rutin.



## 3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	-	100	120

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh upaya yang maksimal dari SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Meskipun mengalami tantangan dengan adanya kebutuhan penganggaran yang tidak dapat diprediksi serta kurang updatenya pemantauan kinerja anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju senantiasa bersinergi dan berinovasi sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Standar Nasional/*Benchmark* Internasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

Sumber: Buku Renstra DJP dan Aplikasi Mandor

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di tahun 2024 mampu melampaui target dan standar nasional yang ditetapkan.

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - Melakukan koordinasi antara Kepala Kantor, PPK, Kasuki, Bendahara, dan PBJ terkait rencana anggaran dan belanja;
  - Mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kinerja di tahun-tahun sebelumnya;
  - Melakukan monitoring IKPA secara rutin.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Keberhasilan pencapaian target didukung oleh pelaksanaan tugas, manajemen SDM, dan rencana kerja yang dijalankan secara maksimal serta dengan adanya upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan inovasi penggunaan teknologi, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan sinergi antara pegawai, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Kegiatan/program yang dilakukan untuk menunjang pencapaian antara lain:
  - Melakukan koordinasi antara Kepala Kantor, PPK, Kasuki, Bendahara, dan PBJ terkait rencana anggaran dan belanja;
  - Mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kinerja di tahun-tahun sebelumnya;
  - Melakukan monitoring IKPA secara rutin.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun selama tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Kendala utama yang dihadapi terkait IKU ini di tahun 2024 adalah kebutuhan penganggaran yang tidak dapat diprediksi serta kurang updatenya pemantauan kinerja anggaran. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
  - Melakukan koordinasi antara Kepala Kantor, PPK, Kasuki, Bendahara, dan PBJ terkait rencana anggaran dan belanja;
  - Mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kinerja di tahun-tahun sebelumnya;
  - Melakukan monitoring IKPA secara rutin.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.



- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem  
Pencapaian IKU memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi antara PPK, Bendahara, PBJ, dan seksi terkait pelaksanaan anggaran</li> <li>• Melakukan monitoring IKPA secara rutin</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan KPPN dan KPKNL terkait Anggaran dan Barang Milik Negara serta Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan Kantor Pusat DJP</li> </ul>	2025



## B. Realisasi Anggaran

### 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Program	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.520.331.000	1.491.320.754	98,09	1.347.777.000	1.311.503.618	97,31
WA Program Dukungan Manajemen	3.546.234.000	3.541.549.550	99,87	7.615.788.000	7.368.447.047	96,75
<b>Jumlah</b>	<b>5.066.565.000</b>	<b>5.032.870.304</b>	<b>99,33</b>	<b>8.963.565.000</b>	<b>8.679.950.665</b>	<b>96,84</b>

Realisasi Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan Realisasi Program tahun 2023.

### 2. Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk 5 (lima) Kegiatan, yaitu 1) Ekstensifikasi Penerimaan Negara; 2) Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi; 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum; 4) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan 5) Pengelolaan Organisasi dan SDM, dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Kegiatan		2024			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara						
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	699.262.000	680.213.235	97,28	674.454.000	665.354.038	98,65
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	338.725.000	336.546.210	99,36	330.393.000	313.175.809	94,79
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	482.344.000	474.561.309	98,39	342.930.000	332.973.771	97,10
<b>Jumlah</b>		<b>1.520.331.000</b>	<b>1.491.320.754</b>	<b>98,09</b>	<b>1.347.777.000</b>	<b>1.311.503.618</b>	<b>97,31</b>
WA	Program Dukungan Manajemen						
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.835.780.000	2.832.581.550	99,89	6.940.651.000	6.754.176.047	97,31
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	710.454.000	708.968.000	99,79	675.137.000	614.271.000	90,98
<b>Jumlah</b>		<b>3.546.234.000</b>	<b>3.541.549.550</b>	<b>99,87</b>	<b>7.615.788.000</b>	<b>7.368.447.047</b>	<b>96,75</b>

Realisasi Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Tahun 2024 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan Realisasi Kegiatan Tahun 2023.

### 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output dan SubOutput pada Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk 4 (empat) Output pada Program Pengelolaan Penerimaan Negara, yaitu 1) Data dan Informasi Publik; 2) Komunikasi Publik; 3) Penanganan Perkara; dan 4) Pemeriksaan dan Audit Penerimaan, dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:



Output/SubOutput Program Pengelolaan Penerimaan Negara		2024			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara							
BMA	Data dan Informasi Publik						
BMA.04	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	256.025.000	252.519.728	98,63	92.676.000	91.632.101	98,87
BMA.05	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	443.237.000	427.693.507	96,49	581.778.000	573.721.937	98,62
<b>Jumlah Output Data dan Informasi Publik</b>		<b>699.262.000</b>	<b>680.213.235</b>	<b>97,28</b>	<b>674.454.000</b>	<b>665.354.038</b>	<b>98,65</b>
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							
BMB	Komunikasi Publik						
BMB.03	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	111.021.000	110.524.250	99,55	110.721.000	99.351.637	89,73
BMB.04	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	227.704.000	226.021.960	99,26	219.672.000	213.824.172	97,34
<b>Jumlah Output Komunikasi Publik</b>		<b>338.725.000</b>	<b>336.546.210</b>	<b>99,36</b>	<b>330.393.000</b>	<b>313.175.809</b>	<b>94,79</b>
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum							
BCE	Penanganan Perkara						
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	141.400.000	140.524.608	99,38	57.485.000	54.621.554	95,02
<b>Jumlah Output Penanganan Perkara</b>		<b>141.400.000</b>	<b>140.524.608</b>	<b>99,38</b>	<b>57.485.000</b>	<b>54.621.554</b>	<b>95,02</b>
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan						
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	109.032.000	108.766.470	99,76	64.032.000	62.937.799	98,29
BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	219.399.000	215.766.231	98,34	178.900.000	178.635.484	99,85
BIG.005	Laporan Penilaian	12.513.000	9.504.000	75,95	42.513.000	36.778.934	86,51
<b>Jumlah Output Pemeriksaan dan Audit Penerimaan</b>		<b>340.944.000</b>	<b>334.036.701</b>	<b>97,97</b>	<b>285.445.000</b>	<b>278.352.217</b>	<b>97,52</b>

Realisasi Output pada Program Pengelolaan Penerimaan Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan Realisasi Kegiatan tahun 2023 pada Output Data dan Informasi Publik, sedangkan untuk Output lainnya mengalami kenaikan.

#### 4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output dan SubOutput pada Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk 3 (tiga) Output pada Program Dukungan Manajemen, yaitu 1) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2) Layanan Dukungan Manajemen Internal; dan 3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Output/SubOutput Program Dukungan Manajemen		2024			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
CAN.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-		2.142.000	1.957.500	91,39
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2.142.000</b>	<b>1.957.500</b>	<b>91,39</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.001	Kerumahtanggaan	724.248.000	723.464.772	99,89	562.898.000	557.588.840	99,06
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.111.532.000	2.109.116.778	99,89	2.215.964.000	2.059.533.005	92,94
<b>Jumlah</b>		<b>2.835.780.000</b>	<b>2.832.581.550</b>	<b>99,89</b>	<b>2.778.862.000</b>	<b>2.617.121.845</b>	<b>94,18</b>
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-		453.505.000	443.756.000	97,85
EBB.004	Gedung/Bangunan	-	-		3.706.142.000	3.691.340.702	99,60
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>4.159.647.000</b>	<b>4.135.096.702</b>	<b>99,41</b>
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.994	Layanan Perkantoran	710.454.000	708.968.000	99,79	110.721.000	99.351.637	89,73
<b>Jumlah</b>		<b>710.454.000</b>	<b>708.968.000</b>	<b>99,79</b>	<b>110.721.000</b>	<b>99.351.637</b>	<b>89,73</b>

Pada tahun 2024 terdapat lebih sedikit SubOutput dibandingkan tahun 2023, yang mana hanya terdapat 3 (tiga) SubOutput pada 2024 dan 6 (enam) SubOutput pada 2023. Perbedaan jumlah



SubOut ini disebabkan oleh adanya belanja modal pada tahun 2023, sementara untuk tahun 2024 tidak terdapat belanja modal.

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapaun efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju di Tahun 2024 antara lain:

#### 1. Efisiensi Anggaran

Dilakukan dengan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Anggaran benar-benar diperuntukkan untuk hal-hal yang memberikan *output/outcome* yang meningkatkan kinerja khususnya penerimaan, seperti dengan melaksanakan penyuluhan/FGD dengan *stakeholder*, penggalan potensi pajak, dan sebagainya. Selain itu, diupayakan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat mengakomodir beberapa keperluan penugasan.

#### 2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dilakukan dengan menempatkan pegawai pada unit organisasi sesuai kompetensi yang dimiliki sehingga jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas dapat sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan dalam penggunaan SDM). Dalam pelaksanaan tugas, SDM yang dimiliki adalah sebanyak 69 pegawai dengan rincian 65 pegawai bertugas di KPP dan 4 pegawai bertugas di KP2KP Pasangkayu. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah formasi ideal KPP Pratama Mamuju adalah sebanyak 83 pegawai sehingga terdapat kekurangan 14 pegawai. Dengan jumlah formasi pegawai yang jauh dari ideal dan luasan wilayah dan wajib pajak KPP Pratama Mamuju yang besar maka kegiatan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara *task force* (tim), dimana seluruh pegawai dilibatkan dalam kegiatan pelayanan maupun penggalan potensi kepada wajib pajak. Tim tersebut melibatkan gabungan pegawai di beberapa seksi tentunya dengan tetap memperhatikan tugas utama masing-masing pegawai

#### 3. Efisiensi Organisasi

Dilakukan dengan peningkatan sinergi atau kolaborasi antara unit organisasi (subbagain/seksi/tim). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, diupayakan agar seluruh unit organisasi dapat terlibat sehingga lebih efisien dalam progres kinerja organisasi.

#### 4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

Dilakukan dengan pemanfaatan aset secara bersama contohnya penggunaan jaringan internet, ruang rapat, dan mobil dinas. Misalnya mobil dinas dapat digunakan oleh unit organisasi yang membutuhkan dan dapat digunakan bersama dalam hal daerah tujuan penugasan sama.



#### 5. Efisiensi Teknologi Informasi

Dilakukan dengan penerapan pemberian layanan dan penggunaan dokumen secara digital serta penyimpanan *file* berbasis *cloud* menggunakan akun Microsoft Kemenkeu.

### D. Kinerja Lain-Lain

Adapun keberhasilan yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

- a. KPP Pratama Mamuju berhasil meraih capaian penerimaan sebesar 100,04%.
- b. KPP Pratama Mamuju juga mencapai tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan capaian 102,38%.
- c. Dari anggaran yang disampaikan pada awal tahun telah terserap secara optimal pada tahun 2024 ini. KPP Pratama Mamuju mempunyai pagu anggaran Rp5.069.406.000 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp5.033.056.304 yaitu sebesar 99,28% dari pagu awal tahun.
- d. KPP Pratama Mamuju mendapat penghargaan sebagai satuan kerja dengan laporan keuangan TA 2023 Audited Tingkat UAKPA terbaik harapan pertama tingkat Nasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Sertifikat nomor SERT-4233/PJ/2024 tanggal 9 September 2024.
- e. KPP Pratama Mamuju mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja tingkat KPP dengan Pengelolaan media Sosial terbaik III tingkat Kantor Wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara melalui piagam nomor S-472/WPJ.15/SERT/2024 tanggal 6 November 2024.
- f. KPP Pratama Mamuju merupakan salah satu dari 5 KPP di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara yang mendapat kesempatan presentasi pada Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2024 melalui nota dinas nomor ND-5837/WPJ.15/2024 tanggal 23 September 2024.
- g. Pegawai KPP Pratama Mamuju yaitu Faustina Zahra Qotrunnada menjadi salah satu Semifinalis Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-3989/PJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024.

### E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Di tahun 2024 evaluasi atas kinerja tidak hanya dilakukan setiap triwulan melalui rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) tapi juga rutin dilakukan setidaknya sekali dalam setiap bulan untuk mengukur capaian kinerja sementara serta untuk memastikan akuntabilitas kinerja. Hal ini akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu rekomendasi atas hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal juga telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh pengampu proses bisnis terkait. Begitu pula atas rekomendasi dan/atau permintaan klarifikasi dari pihak eksternal, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dijadikan pembelajaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun-tahun berikutnya.



Sebagai unit kerja yang telah meraih predikat ZIWBK dan sedang bersiap untuk mengikuti penilaian ZIWBKM, KPP Pratama Mamuju mempersiapkan langkah-langkah berikut:

1. Terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada wajib pajak;
2. Melakukan pemantauan terhadap inovasi-inovasi yang telah ada di tahun 2023 agar tetap berjalan dengan baik di tahun-tahun selanjutnya;
3. Melakukan peningkatan inovasi-inovasi yang telah ada sebelumnya dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menunjang kemudahan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan serta mempermudah pegawai internal untuk melaksanakan administrasi kantor;
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi dengan berbagai pembahasan dan diskusi dalam kegiatannya;
5. Menyusun strategi-strategi kinerja agar penerimaan di tahun 2025 dapat tercapai.

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mamuju diantaranya yaitu:

1. Aplikasi Pengawasan Anggaran Dan Kepatuhan Bendahara (APAKAREBA).  
Pada tahun 2023 KPP Pratama Mamuju berhasil merealisasikan penerimaan pajak neto sebesar 745,8 M atau sebesar 102,7% dari target yang diamanatkan sebesar 726,5 M. Penopang penerimaan pajak terbesar di KPP Pratama Mamuju adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 55,57%. Dari sektor ini, penerimaan berasal dari setoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Mengingat besarnya kontribusi penerimaan perpajakan dari Bendahara Pemerintah, sudah sewajarnya apabila dilakukan pemantauan dan asistensi yang berkelanjutan kepada para Bendahara Pemerintah sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun sebuah sarana (*tools*) yang dapat membantu memudahkan pekerjaan para Bendahara Pemerintah terkait perpajakan dan sekaligus sarana untuk memberikan asistensi/edukasi serta dapat digunakan sebagai sarana pemantauan/pengawasan melalui Penetapan Aplikasi Pengawasan Anggaran Dan Kepatuhan Bendahara (APAKAREBA) Sebagai Inovasi Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Nomor KEP-46/KPP.1513/2024 tanggal 1 Februari 2024. APAKAREBA (Aplikasi Pengawasan Anggaran dan Kepatuhan Bendahara) adalah sebuah aplikasi berbasis Web sebagai sarana (*tools*) yang diharapkan dapat membantu pekerjaan para Bendahara Pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sebagai media edukasi/asistensi dan sarana pemantauan/pengawasan. Aplikasi ini diperuntukkan bagi para Bendahara Pemerintah pada satkersatker di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Pada aplikasi ini terdapat 3 menu utama yaitu kamus kepatuhan, simulasi, dan dashboard pagu.
2. Aplikasi Saluran Aspirasi, Potensi, Observasi, Dan Data (SAPOTa).  
Wilayah kerja KPP Pratama Mamuju meliputi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Dalam menjalankan tugas dan



fungsinya, KPP Pratama Mamuju ditunjang oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu. Luasan wilayah kerja KPP Pratama Mamuju pada ketiga kabupaten yaitu 11.124,51 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 611.292 jiwa pada tahun 2023. Jumlah wajib pajak seluruhnya sebanyak 171.802 dengan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 57.377 WP. Tantangan utama terkait dengan wilayah kerja yang cukup luas dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan untuk dapat diakses. Konektifitas antar wilayah yang belum terbangun cukup menyulitkan KPP Pratama Mamuju untuk dapat menjangkau dan melakukan penggalian potensi di daerah tersebut. Selain itu, jumlah pegawai terutama AR yang terbatas semakin menyulitkan KPP Pratama Mamuju untuk dapat melakukan penggalian potensi di setiap sudut wilayah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut di atas adalah dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa *supply data/informasi* terkait potensi perpajakan yang berada disekitar wilayah tempat tinggal antara lain bangunan, toko, pabrik dan tempat aktivitas bisnis lainnya. Selain partisipasi dalam bentuk dukungan data/informasi, masyarakat juga perlu diberikan akses untuk menyampaikan aspirasi misalnya terkait kondisi fasilitas umum disekitar lokasi tempat tinggalnya. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun kepada KPP Pratama Mamuju. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu di susun aplikasi SAPOTa (Saluran Aspirasi, Potensi, Observasi, dan Data). SAPOTa (Saluran Aspirasi, Potensi, Observasi, dan Data) adalah sebuah aplikasi berbasis Web yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, kritik, data/informasi kepada KPP Pratama Mamuju serta sebagai sarana yang membantu dan memudahkan pegawai KPP Pratama Mamuju dalam kegiatan pengumpulan data/informasi untuk penggalian potensi perpajakan. Dengan kata lain, pengguna aplikasi SAPOTa secara umum adalah masyarakat yang dipilih (agen eksternal) dan pegawai KPP Pratama Mamuju (agen internal). Terdapat 3 fungsi utama dari aplikasi SAPOTa yaitu sarana penyampaian aspirasi, sarana penyampaian kritik dan saran, dan sarana penyampaian data/informasi. Penetapan inovasi dilakukan melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Nomor Kep-47/Kpp.1513/2024 tentang Penetapan Aplikasi Saluran Aspirasi, Potensi, Observasi, Dan Data (SAPOTa) Sebagai Inovasi Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju tanggal 1 Februari 2024.

### 3. Formulir Pelaporan Gratifikasi (FORMASI 814) .

Sebagai upaya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam pengawasan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPP Pratama Mamuju, tim Unit Pengendalian Gratifikasi menyusun inovasi berupa Formulir Pelaporan Gratifikasi (FORMASI 814) yang dapat diisi oleh Pegawai maupun wajib pajak/masyarakat. FORMASI 814 diharapkan memudahkan pelaporan gratifikasi sehingga pelaporan dapat dilaksanakan dengan segera dan dapat diakses kapanpun serta dimanapun oleh pegawai sehingga meningkatkan keandalan informasinya. Formulir tersebut dapat diakses oleh masyarakat sehingga pengendalian gratifikasi dapat dilaksanakan baik oleh pegawai, UPG maupun wajib



pajak/masyarakat. Penyampaian Inovasi UPG KPP Pratama Mamuju Tahun 2024 dilakukan melalui ND-928/KPP.1513/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

#### 4. Titik Kritis Proses Bisnis Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam rangka peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan Proses Bisnis Tim Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPP Pratama Mamuju menyusun titik kritis proses bisnis (probis) Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam RPT di tahun 2024, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak;
- c. Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Paksa serta Administrasi Pelaksanaan Sita di Kantor Pelayanan Pajak;
- d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak;
- e. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak; dan
- f. Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data Master File Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Penyusunan titik kritis dilakukan agar masing-masing pengampu probis lebih memperhatikan dan menaati ketentuan yang berlaku dalam setiap rangkaian pelaksanaan pekerjaan. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan Proses Bisnis disampaikan melalui Nota Dinas Nomor ND-1027/KPP.1513/2024 tanggal 9 September 2024.



## Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil validasi Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju, diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju berhasil memperoleh capaian melampaui target yang ditetapkan (tercapai 105,87).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu LAKIN diharapkan dapat menambah informasi lain mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Mamuju dalam berbagai bidang dan beberapa inovasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mamuju dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja yang perlu terus dikembangkan serta disempurnakan sehingga menjadi upaya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.



## LAMPIRAN

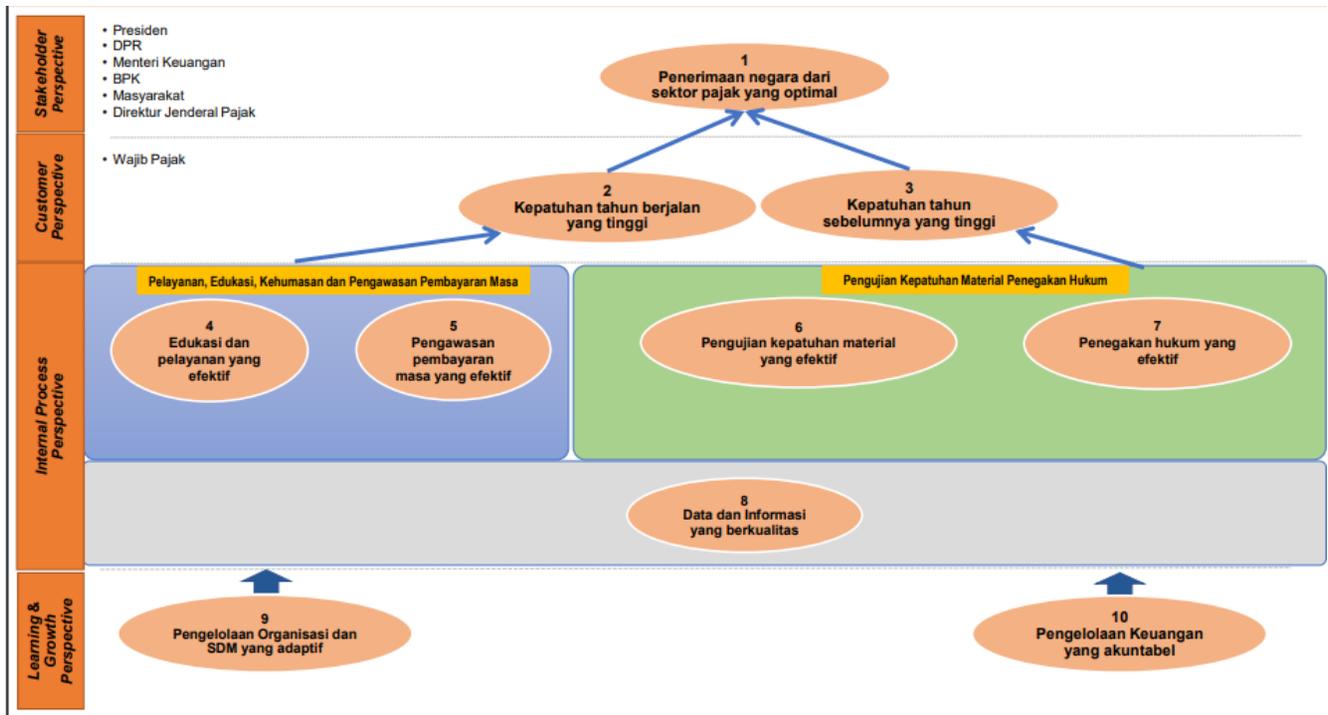
- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-12/WPJ.15/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI  
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

#### Program/ Kegiatan Tahun 2024

#### Anggaran

##### A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1,449,729,000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 670,560,000

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp 338,725,000

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 440,444,000

##### B. Program Dukungan Manajemen

Rp 3,219,677,000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 2,509,223,000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 710,454,000

#### Total

Rp 4,669,406,000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan  
Tenggara

Mamuju , 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju



Ditandatangani Secara Elektronik  
Heri Kuswanto



Ditandatangani Secara Elektronik  
Laode Irfah Firdaus



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI  
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Mamuju, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Mamuju,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Laode Irfah Firdaus



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1	Persentase pengawasan pembayaran masa	Kolaborasi dengan KPPN dalam kerangka Kemenkeu Satu dan satker Wajib Pajak bendaharawan <i>prominent</i> (satker vertikal, satker pemprov, satker pemkab) guna optimalisasi pengawasan penerimaan bendaharawan	Peningkatan kepatuhan bendaharawan	Q1 s.d. Q4: Mengadakan kegiatan/ acara kolaborasi dengan KPPN dan satker Wajib Pajak <i>prominent</i>	Q1 s.d. Q4: Kegiatan/ acara <i>Forum Group Discussion (FGD)/ In-House Training (IHT)/ Monitoring dan Evaluasi (Monev)</i>	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan VI	-
2	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penggalian potensi Wajib Pajak sektor usaha dominan (sektor pengolahan sawit, pertambangan mineral, perdagangan umum, tambak udang, dan orang pribadi) melalui bedah Wajib Pajak oleh Komite Kepatuhan melibatkan forum Account Representative dan Fungsional yang dilakukan tiap bulan	Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sektor usaha dominan	Q1 s.d. Q4: Melakukan bedah Wajib Pajak oleh Komite Kepatuhan yang melibatkan forum Account Representative dan Fungsional	Q1 s.d. Q4: Bedah Wajib Pajak oleh Komite Kepatuhan	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I dan Supervisor	-



No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
3	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Mengirimkan imbauan terkait peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak melalui omni channel (Whatsapp blast, surel)	Perubahan perilaku lapor dan bayar Wajib Pajak	Q1 s.d. Q4: Melakukan imbauan pembayaran pajak ke Wajib Pajak melalui Whatsapp blast dan surel	Q1 s.d. Q4: Imbauan pada Whatsapp blast dan surel	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP	-
4	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Mengadakan pekan panutan pelaporan SPT Tahunan yang melibatkan pimpinan daerah dan tokoh masyarakat	Perubahan perilaku lapor dan bayar Wajib Pajak	Q1 s.d. Q4: Mengomunikasikan dengan pimpinan daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka kegiatan pekan panutan pelaporan SPT Tahunan	Q1 s.d. Q4: Pekan panutan pelaporan SPT Tahunan	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP Kepala Seksi Pengawasan IV	-
5.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Pembahasan antara <i>Account Representative</i> dan Fungsional Pemeriksa terkait Wajib Pajak yang berpotensi close LHP2DK berstatus usulan pemeriksaan.	Kegiatan/Pencajaan Optimal dalam efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Q1 s.d. Q4: Melakukan pembahasan antara <i>Account Representative</i> dan Fungsional Pemeriksa terkait Wajib Pajak yang berpotensi close LHP2DK berstatus usulan pemeriksaan	Q1 s.d. Q4: Kegiatan/ acara <i>Forum Group Discussion (FGD)/ In-House Training (IHT)/ Monitoring dan Evaluasi (Monev)</i>	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Supervisor Kepala Seksi Pengawasan	-



No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
6.	Tingkat efektivitas penagihan	Pendataan piutang pajak yang daluarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluarsa	Rekap Data Piutang Daluwarsa/Pencapaian optimal dalam efektivitas penagihan	Q1 s.d. Q4: Melakukan pendataan piutang pajak yang daluarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluarsa	Q1 s.d. Q4: Data piutang pajak yang daluarsa	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

Mamuju, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju



Ditandatangani Secara Elektronik  
Laode Irfah Firdaus



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Laode Irfah Firdaus, S.E., M.M., M.Si.	NAMA	Heri Kuswanto, S.E., Ak., M.Si.	
NIP	19761102 199602 1 002	NIP	196707081996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina/IVa	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



4.	Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
11.		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	Proses Bisnis
13.		Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap</p>



PERILAKU KERJA		
		semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Laode Irfah Firdaus

19761102 199602 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto

19670708 199603 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	73 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100 <sup>^</sup>
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100 <sup>^</sup>
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Laode Irfah Firdaus

19761102 199602 1 002

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto

19670708 199603 1 001



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**  
**KPP PRATAMA MAMUJU**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					30,00%	96,45
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					96,45
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	91,55	19%	42,22%	91,55
<i>Customer Perspective</i>					20,00%	100,96
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					101,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	26%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,38%	19%	42,22%	102,38
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					100,91
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,91%	21%	100,00%	100,91
<i>Internal Process Perspective</i>					25,00%	110,05
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					114,72
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,43%	21%	50,00%	109,43
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif					119,39
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,16%	14%	33,33%	118,16
7	Penegakan hukum yang efektif					76,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	97,15%	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas					120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	75,02%	19%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>					25,00%	116,90
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					113,80
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,46	14%	33,33%	117,46
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,97	14%	33,33%	114,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,88	14%	33,33%	109,87
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>						<b>105,87</b>

Mamuju, 17 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik  
 Afriandini  
 NIP 19860414 200710 2 001

Mengetahui  
 Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
 La Ode Irfah Firdaus  
 NIP 19761102 199602 1 002



**RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**  
**KPP PRATAMA MAMUJU**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP																					
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak																						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak Target penerimaan pajak	X 100%	100,00%	686.381.611.000 686.381.611.000	100,04%	686.661.657.584 686.381.611.000	0,04%																				
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100		91,55		-8,46																				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	659.371.418.000 659.371.418.000	100,01%	659.405.440.699 659.371.418.000	0,01%																				
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[ \frac{(L2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	X 100%	100,00%	32441 32441	102,38%	31481,4 32441	2,38%																				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	27.010.193.000 27.010.193.000	100,91%	27.256.216.885 27.010.193.000	0,91%																				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = ((25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar))		74,00%		88,80%		14,80%																				
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		100,00%		109,43%		9,43%																				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90,00%		120,00%		30,00%																				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100,00%		120,00%		20,00%																				
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching) 2	X 100%	100,00%		120,00%		20,00%																				
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100,00%		118,16%		18,16%																				
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)		100,00%		120,00%		20,00%																				
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		75,00%		97,15%		22,15%																				
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%		0,00%		-100,00%																				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$	x 100%	100,00%		120,00%		20,00%																				
8b-CP	Persentase penghipungan data regional dari ILAP	$\frac{((70\% \times (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} + 40\%)) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))}{2} + \frac{((70\% \times (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} + 40\%)) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))}{2}$		55,00%		75,02%		20,02%																				
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebiblitan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)		100		117,46		17,46																				
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi		85,00		96,97		11,97																				
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko		90		98,88		8,88																				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formula Konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA &gt; 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 &lt; X &lt; 120</td> <td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td> <td>(91,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 &lt; X &lt; 100</td> <td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td> <td>(80,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>Realisasi IKKPA = 80,00</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA &lt; 80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00		100	120,00		20,00
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										

Mamuju, 17 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik

Afriandini

NIP 19860414 200710 2 001

Mengetahui  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

La Ode Irfah Firdaus

NIP 19761102 199602 1 002

